



**KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

ISMUNARNO, SH

NIM. B4A 099 081

Program Kajian Sistem Peradilan Pidana

Pembimbing :

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2002

TESIS

**KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

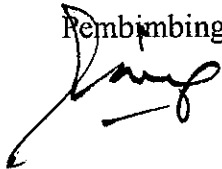
Oleh :
ISMUNARNO, SH
Nim. B4A 099 081/SPP

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA HARI KAMIS
TANGGAL 22 AGUSTUS 2002

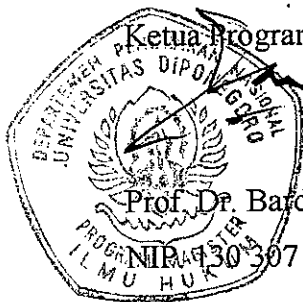
TESIS INI TELAH DITERIMA SEBAGAI PERSYARATAN UNTUK
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER
ILMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

MENGETAHUI

Pembimbing



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.
NIP. 130 307 058



Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.

NIP. 130 307 058

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara sendiri-sendiri melainkan dilakukan secara bersama oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, rahasia bersifat transnasional menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, sehingga lebih merupakan perbuatan korporasi dibanding perbuatan perorangan. Walaupun Undang-undang No. 9 Tahun 1976 dan UU No. 22 Tahun 1997 sebagai penggantinya, keduanya sudah mengatur perihal dapat dipertanggungjawabkannya korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika akan tetapi selama kurun waktu sejak dikeluarkannya UU tersebut sampai sekarang belum ada pemidanaan terhadap korporasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka tesis ini membahas dua pokok masalah (1) Bagaimanakah kebijakan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana narkotika menurut UU No. 22 Tahun 1997 (2) Bagaimanakah kebijakan pertanggungjawaban korporasi yang sebaiknya dirumuskan dalam UU Narkotika di masa yang akan datang.

Pendekatan penelitian adalah Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif. Data bertumpu pada data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif analistis.

Kesimpulan hasil penelitian adalah bahwa kebijakan pertanggungjawaban korporasi dalam UU No. 22 Tahun 1997 tidak *applicable* karena mengandung beberapa kelemahan. Untuk itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah : Perlunya kejelasan tentang subjek tindak pidana narkotika, penerapan *double track system*, perumusan dalam pasal atau sub bab tersendiri mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, ketegasan mengenai UU Narkotika didahulukan terhadap UU lainnya, pembatasan waktu pembayaran denda, penggunaan sistem kategori dan pembenahan Hukum Acara Pidana.

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya laporan penelitian tesis yang berjudul "KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA", dengan baik dan lancar. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir guna memperoleh Magister Hukum (MH) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Pemilihan topik masalah pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana narkoba adalah dengan pertimbangan bahwa masalah narkoba merupakan topik yang bersifat aktual, menarik untuk dikaji, diperbincangkan dan diperdebatkan. Walaupun Undang-undang Narkoba pada masa kemerdekaan ini sudah mengalami dua kali pergantian tetapi rupanya angka penyalahgunaan narkoba tetap meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini memberi dorongan yang kuat kepada penulis untuk mengkaji Undang-undang Narkoba sebagai dasar pijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dengan hukum pidana melalui pembahasan yang tajam dan kritis dalam tesis ini.

Tesis ini dapat diselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak yang berupa : nasehat, bimbingan, petunjuk serta referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH selaku Pembimbing, yang telah dengan sabar dan tekun memberikan arahan dan bimbingan sejak awal penulisan hingga selesai.
2. Bapak Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH, yang telah memberikan arahan dan bimbingan di bidang metodologi.
3. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa laporan penelitian tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak demi penyempurnaan tesis ini.

Semoga laporan penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Semarang, Juli 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kontribusi Penelitian	13
E. Metodologi Penelitian	14
F. Sistematika Penelitian	17
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 19
A. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	 19
1. Tindak Pidana	19
2. Pertanggungjawaban Pidana	29
B. Pengertian Korporasi dan Kedudukan Kor- porasi Sebagai Subyek Tindak Pidana ...	 44
1. Pengertian Korporasi	44
2. Kedudukan Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana	 55
C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ...	62
D. Kebijakan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dengan Hukum Pidana	 78

Halaman

1. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dengan Sarana Non Penal	80
2. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dengan Sarana Penal	83
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	91
A. Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika	91
1. Perkembangan Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia	94
a. Ordonansi Obat Bius	94
b. Undang-undang No. 9 Tahun 1976 ..	101
c. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 ..	115
2. Kelemahan Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Berdasar UU No. 22 Tahun 1997	124
B. Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Yang Sebaiknya Dirumuskan Dalam Undang-undang Narkotika Yang Akan Datang	156
1. Pertanggungjawaban Pimpinan Korporasi	157
2. Pertanggungjawaban Pengurus Korporasi	160
3. Pertanggungjawaban Korporasi	161

	Halaman
BAB IV PENUTUP	181
A. Kesimpulan	181
B. Saran	184
DAFTAR PUSTAKA	186
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia perlu melakukan pembangunan di segala bidang. Hakekat pembangunan adalah proses pembaharuan disegala sektor kehidupan, 1) untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia di segala bidang.

Upaya meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia dengan melalui pembangunan mendapatkan hambatan yang berat dengan semakin maraknya peredaran narkoba.

Pada tahun 2000, di Indonesia tercatat 2 juta orang korban dari berbagai usia dan latar belakang untuk mencegah bukanlah hal yang mudah karena harus berhadapan dengan jaringan internasional. 2)

Ancaman disintegratif atau penghancur bangsa dan negara tercinta yang dimainkan Narkoba tidak kalah dahsyatnya dengan permasalahan lainnya seperti konflik antar etnis dan antar agama, gerakan separatisme, konflik antar elite politik serta KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme). 3)

1) Dahlan Thaib, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 3.

2) DPW Wanita Katolik, 2001, *Petunjuk Praktis Bagi Keluarga untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Yogyakarta: Media Pressindo, h. 3.

3) Dominichus Lewuk, 2001, *Narkoba*, Yogyakarta: Media Pressindo, h. 9.

Peredarannya Narkoba dilakukan dengan canggih dan rapih. Malapetaka yang ditimbulkan oleh Narkoba pun sangat kompleks, tidak hanya secara moral, sosial, ekonomi (miliaran rupiah per hari habis karena belanja Narkoba), tetapi juga secara fisik baik manusia individual maupun masyarakat dan bangsa ini. 4)

Permasalahan penyalahgunaan/ketergantungan Narkoba sudah sedemikian kompleks sehingga dapat merupakan ancaman dari sudut pandang mikro (keluarga) maupun makro (masyarakat, bangsa dan negara) yang pada gilirannya membahayakan ketahanan nasional.

Secara garis besar terdapat tiga bahaya penyalahgunaan narkotika.

- a) Bahaya penyalahgunaan narkotika yang pertama terletak pada sifat dari zat-zat narkotika sendiri yang bila dipergunakan di luar tujuan pengobatan, dapat membawa kecanduan dan ketergantungan si pemakai, terhadap zat-zat narkotika, ditambah dengan sifat tolerance yang menyebabkan si pemakai untuk mendapatkan efek yang sama dari suatu jenis narkotika tertentu, memerlukan dosis yang semakin

4) Dadang Hawari, 2001, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*, Jakarta : BP. FKUI, h. 69

besar yang akan menjurus dari penggunaan zat yang kurang keras ke arah yang lebih keras (*escalation*) yang akhirnya hidupnya terjerat dan benar-benar tergantung kepada obat-obat narkotika yang dosisnya besar dan jenis yang terkeras.

- b) Bahaya dan akibat bagi pribadi yang menyalahgunakan narkotika

Bagi yang menderita ketergantungan phykis tidak begitu membahayakan, hanya terasa tidak enak seperti mulut pahit, asam dan lain-lain, dan bila tahan bisa menjadi baik kembali, tetapi bila tidak tahan mengalami ketergantungan psikhis (kencanduan). Kecanduan yang tidak dipenuhi, berakibat badan tersiksa (pusing-pusing sampai menimbulkan kematian).

- c) Bahaya terhadap kehidupan masyarakat, sebab si pecandu narkotika yang sedang ketagihan dan kebutulan tidak memiliki uang untuk membeli narkotika, maka dalam keadaan tersiksa, yang bersangkutan akan berusaha dengan berbagai upaya seperti ngemis, mencuri bahkan bisa membunuh, sehingga meningkatkan kriminilitas dan berbagai penyakit masyarakat. 5)

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, terutama di bidang transportasi dan komunikasi serta

5) Sudjono Dirjosisworo, 1976, *Kriminalistik*, Bandung: Rosda Karya.

penemuan-penemuan baru khususnya di bidang obat-obatan telah memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif yang terjadi adalah meningkatnya bidang penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan psikotropika di hampir semua negara di dunia. Nampaknya tidak ada satupun negara di dunia pada abad 21 ini terbebas dari dampak tersebut.

Semakin meningkatnya penggunaan narkotika dewasa ini tidak untuk tujuan pengobatan ataupun kepentingan ilmu pengetahuan tetapi merupakan usaha untuk memperoleh keuntungan finansial yang sangat besar. Tujuan ini tercapai dengan melalui perdagangan narkotika lintas batas wilayah dalam suatu negara, antar negara, dan bahkan internasional. Transaksi perdagangan narkotika ini sudah barang tentu melibatkan banyak orang, sindikat/jaringan yang terorganisasikan secara rapi dan profesional.

Sebagai negara kepulauan (kurang lebih ada 13 ribu pulau) perairan Indonesia meliputi kurang lebih tujuh buah selat yang sangat penting bagi pelayaran internasional. Ketujuh buah selat ini adalah, Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Ombai, Selat Wetar, dan Selat Makasar. Sejak setelah Konvensi Hukum Laut, 1982, berlaku penuh pada tanggal 16 Nopember 1994 di seluruh negara peserta konvensi maka luas wilayah Indonesis bertambah menjadi

18 juta kilometer persegi. 6)

Luasnya wilayah dan letak geografis yang diapit oleh dua benua Asia dan Australia, dikelilingi oleh laut, batas wilayah negara yang berupa laut dan darat banyaknya pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke serta batas negara dengan negara lain yang melibatkan beberapa negara menjadikan Indonesia sebagai tempat yang sangat strategis bagi perdagangan narkotika baik untuk transit dari lalu lintas perdagangan narkotika internasional maupun sebagai tempat tujuan atau sasaran pemasaran narkotika. Kondisi ini didukung lagi oleh jumlah penduduk yang besar.

Perkembangan tindak pidana narkotika pada abad ke 21 (ini) sudah memiliki jaringan internasional, bahkan kekuatan jaringan tersebut di beberapa negara berhasil memaksakan kehendaknya kepada pemerintah yang sedang berkuasa, seperti terjadi di negara-negara Panama, Columbia, Nicaragua, dan Bolivia. Perkembangan tindak pidana narkotika di Columbia pada akhir-akhir ini menunjukkan keadaan sebaliknya. Selain itu, perkembangan tindak pidana narkotika transnasional pada dewasa ini, semakin meluas, tidak hanya berkaitan dengan negara produsen dan negara konsumen, akan tetapi

6) Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

berkaitan juga dengan negara transit.

Di wilayah Asia Tenggara terdapat pusat produksi narkotika sekaligus pusat distribusi ke seluruh wilayah Asia Pasifik, termasuk Australia dan Indonesia. Tempat ini, disebut *the golden triangle* atau segi tiga emas, yang terletak di perbatasan antara Thailand, Laos, dan Kamboja.

Penyempitan jarak antar negara sebagai akibat perkembangan transportasi dan komunikasi telah memberikan keuntungan yang tidak ternilai bagi pelaku-pelaku tindak pidana narkotika di seluruh dunia.

Kejahatan narkotika adalah merupakan salah satu kejahatan internasional dan karena itu bukan hanya masalah nasional negara-negara sendiri-sendiri terpisah satu sama lain. 7)

Bentuk pelaksanaan penegakkan hukum yang hanya mementingkan keterikatan akan batas teritorial merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat konvensional dan tidak sejalan dengan perkembangan teknologi yang sekarang berkembang, sehingga bentuk penegakan hukum sekarang ini tidak efektif dalam memberantas lalu-lintas perdagangan gelap narkotika. 8)

7) Dep Keh, 1994, *Pertemuan Ilmiah tentang Penyitaan Hak Milik Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : BPHN, hal. 70

8) Romli Atmasasmita, 1992, *Masalah-masalah yang Berkaitan Dengan Penerangan dan Pelaksanaan Konvensi Internasional Tentang Lalu Lintas Perdagangan Gelap Obat Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta (Makalah).

Ancaman dan akibat tindak pidana narkotika tersebut di atas merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara untuk menanggulangnya. Tanggung jawab tersebut sudah merupakan bagian integral dalam kehidupan masyarakat modern, bahkan dapat dikemukakan, tidak ada satu pun negara di dunia berkehendak melindungi tindak pidana pada umumnya dan pada khususnya, tindak pidana narkotika sehingga luput dari jangkauan hukum.

Prinsip tersebut di atas sudah dianut dan diakui pula oleh bangsa Indonesia, dan merupakan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah bangsa-bangsa lain di dunia serta secara eksplisit sudah dicantumkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan antara lain sebagai berikut:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dari Pembukaan UUD 1945 tersebut tersirat suatu

makna bahwa bangsa Indonesia ikut berperan secara aktif dalam upaya mengatasi ancaman tindak pidana narkotika yang mengganggu upaya untuk memajukan kesejahteraan umum, upaya mencerdaskan bangsa dan upaya untuk mewujudkan ketertiban dunia.

Masalah narkotika sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda (Hindia Belanda) hanya permasalahannya tidak serumit bahkan bahaya yang ditimbulkannya tidak sebesar sekarang. 9)

Sebelum Indonesia merdeka, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika oleh pemerintah Hindia Belanda ketika itu, bertujuan menyalurkan pelbagai ketentuan mengenai perdagangan candu, dan telah ditetapkan *Verdoovende Middelen Ordonnantie*. *Staatsblad* 1927 Nomor 278 jo 536 atau Ordonansi obat bius yang telah diberlakukan, tanggal 1 Januari 1928.

Ordonansi obat bius 1928 yang dibuat pada masa penjajahan Belanda berdasar pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang menyatakan segala badan negara dan peraturan yang ada pada saat kemerdekaan masih terus berlaku sampai disusunnya aturan yang baru.

Usaha penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan peredarannya di Indonesia tidak lepas dari perkembangan yang terjadi di dunia internasional misalnya salah satu sebab diundangkannya UU no. 9 tahun 1976 adalah

9) Budiarti, 1994, *Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, Makalah pada Pertemuan Ilmiah Tentang Penyitaan Hak Milik Pelaku Tindak Pidana Narkotika tgl. 8-10 Desember 1992, Jakarta : Dep Keh.

konvensi tunggal 1961 yang diratifikasi dengan UU no. 8 tahun 1976. Sedangkan lahirnya Undang-Undang no. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang nomor 22 tahun 1996 tentang Narkotika didahului oleh lahirnya Undang-Undang no. 3 tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971 dan Undang-Undang no. 7 tahun 1997 tentang pengesahan konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988. 10)

Menurut penjelasan Undang-Undang no. 22 tahun 1997 dikeluarkannya Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika karena narkotika ibaratnya adalah sebuah benda berwajah/bermuka dua, di satu sisi bermanfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan tetapi pada sisi lain bisa juga berakibat merusak kesehatan yaitu apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar pengobatan terlebih apabila disertai dengan peredaran narkotika secara liar/gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik perorangan maupun masyarakat.

Kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara sendiri-sendiri, melainkan di-

10) Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya bakti, hal. 193.

lakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia bersifat transnasional dengan modus operandi dan teknologi yang canggih.

Kalau kita simak uraian alinea di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkoba lebih banyak dilakukan oleh korporasi dibanding dilakukan secara perorangan. Hal ini bisa kita bandingkan dengan isi dari pasal 1 butir 19 ketentuan umum dari UU no. 22 tahun 1997 tentang narkoba.

"Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan".

Mengingat bahwa tindak pidana narkoba pada umumnya lebih dilakukan oleh korporasi dibanding perorangan (penjelasan UU no. 22 tahun 1997 alinea ke 4) sudah barang tentu ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana haruslah dirumuskan sedemikian rupa sehingga tujuan dikeluarkannya Undang-Undang no. 22 tahun 1997 tentang narkoba yakni :

1. Menjamin ketersediaan narkoba untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan

2. Mencegah penyalahgunaan narkotika,
3. Memberantas peredaran gelap, narkotika, akan dapat tercapai.

Tindak pidana yang melibatkan korporasi di dalamnya akan menimbulkan bahaya yang lebih besar baik secara kualitas maupun kuantitas oleh karena :

- Korporasi mempunyai kemampuan modal yang relatif lebih besar dari pada pelaku perorangan.
- Korporasi memiliki sumber daya manusia yang relatif lebih besar dan berkualitas.
- Kemampuan managerial korporasi yang baik.
- Kemampuan mempengaruhi penegak hukum dan birokrasi.
- Kemampuan mempengaruhi masyarakat.

Karena itu sudah seharusnya kebijakan pertanggungjawaban secara hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana haruslah lebih keras, tegas dan operasional dibanding pertanggungjawaban pelaku perorangan. Kunci dari semuanya itu terletak pada kebijakan Legislatif yang merupakan landasan kebijakan bagi aparat penegak hukum.

Berdasar pertimbangan di atas maka peneliti tertarik untuk mendalami/meneliti tentang kebijakan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana narkotika.

B. Perumusan Masalah

Penelitian hukum pada hakekatnya adalah upaya untuk mencari jawab suatu masalah tentang hukum. 11) Masalah yang hendak diteliti adalah kebijakan pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana narkotika.

Perundang-undangan narkotika hendaknya bisa menampung semua permasalahan yang ada berkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh korporasi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kebijakan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana narkotika menurut UU no. 22 tahun 1997 ?
2. Bagaimanakah kebijakan pertanggungjawaban korporasi yang sebaiknya dirumuskan dalam Undang-Undang narkotika di masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- 1) Mengetahui bagaimanakah kebijakan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana narkotika menurut UU

11) Soetandyo Wignyo Soebroto, 1999, *Masalah Metodologi Dalam Penelitian Hukum*, Bag. Humas FH UNDIP, Semarang, hal. 25.

no. 22 tahun 1997.

- 2) Mengetahui kebijakan pertanggungjawaban korporasi yang sebaiknya dirumuskan dalam UU Narkotika yang akan datang.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran akademis bagi upaya pengkajian dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana narkotika.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi :

- a. Sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi pembentuk Undang-Undang dalam melakukan peninjauan terhadap Undang-Undang narkotika. Penyempurnaan atau perbaikan terhadap ketentuan pertanggungjawaban korporasi perlu dilakukan agar ketentuan itu bisa dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika.
- b. Dapat memberikan bahan pemikiran atau pertimbangan menangani perkara narkotika. Masukan-masukan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korpo-

rasi diharapkan dapat membantu mengoptimalkan usaha penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasar perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang bertumpu pada data sekunder. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini ialah kebijakan pertanggungjawaban korporasi yang didasarkan pada UU narkotika yang ada selama ini. Seberapa jauh kebijakan pembentuk undang-undang kaitannya dengan pertanggungjawaban korporasi dapat menunjang usaha penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala lainnya. 12)

Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana narkotika.

12) Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hl. 10.

3. Metode Pengumpulan Data

Secara garis besar kegiatan pengumpulan data dapat dilakukan dengan dua cara yakni mencari data dari tulisan atau kepustakaan dan dari lapangan secara langsung. 13)

Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian berpedoman pada jenis data yang diperlukan untuk penyusunan tesis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kepustakaan (data sekunder).

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan sebagai berikut : 14)

1) Bahan-bahan hukum primer, berupa :

a) Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004.

b) Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

2) Bahan-bahan hukum sekunder, berupa :

a) Konsep rancangan Undang-undang (KUHP)

b) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah narkotika.

13) Esmi Warasih, 1999, *Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora*, Semarang : Bag. Humas FH UNDIP, hal. 48.

14) Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

c) Hasil pertemuan ilmiah yang menyangkut tema narkotika.

d) Hasil karya ilmiah yang menyangkut masalah narkotika.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan item dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 15)

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif ini digunakan karena pertimbangan, yaitu :

- a. Metode ini mampu menyesuaikan secara lebih mudah untuk berhadapan dengan kenyataan.
- b. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden.
- c. Metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Analisis kualitatif ini dilakukan secara deskriptif, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau menggambarkan data kebijakan legis-

15) Lexy J. Moleong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya, h. 3.

latif sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud melukiskan realitas kebijakan legislatif sebagaimana yang diharapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh penulis menyusun tesis ini terdiri dalam empat bab, ditambah daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Adapun sistematika tesis yang akan disusun adalah sebagai berikut :

Pendahuluan, dalam bab ini antara lain diuraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi teoritis dan praktis, metode yang dipergunakan dan sistematika penulisan.

Tinjauan Pustaka. Ada empat hal yang diuraikan dalam bab ini yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana, pengertian korporasi dan kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana, pertanggungjawaban korporasi, dan kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan hukum pidana.

Penyajian Hasil Penelitian dan Pembahasan, ada dua hal pokok yang akan diuraikan dalam bab ini yakni:

tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi teoritis dan praktis, metode yang dipergunakan dan sistematika penulisan.

Tinjauan Pustaka. Ada empat hal yang diuraikan dalam bab ini yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana, pengertian korporasi dan kedudukan korporasi sebagai subyek tindak pidana, pertanggungjawaban korporasi, dan kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan hukum pidana.

Penyajian Hasil Penelitian dan Pembahasan, ada dua hal pokok yang akan diuraikan dalam bab ini yakni: Kebijakan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana narkoba di Indonesia. Kemudian akan diuraikan juga bagaimana kebijakan pertanggungjawaban korporasi yang sebaiknya dirumuskan dalam UU narkoba yang akan datang.

Penutup, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua hal pokok yang akan dibahas dalam sub A ini yaitu masalah tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Adanya pertanggungjawaban pidana adalah didahului oleh terjadinya tindak pidana.

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan pengertian yang akan selalu muncul dalam pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana istilah tindak pidana ini merupakan pengertian yuridis yang berbeda dari pengertian perbuatan jahat atau kejahatan dalam pengertian kriminologi.

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Strafbaarfeit*". Belum ada keseragaman dalam penggunaan istilah tersebut misalnya Moeljatno menggunakan istilah "Perbuatan pidana".¹⁶⁾ Utrecht menerjemahkan dengan "sifat melawan hukum dari perbuatan pidana".¹⁷⁾ Andi Zaenal Abidin menggunakan istilah "Delik" dengan alasan lebih singkat, operasional dan dikenal diseluruh dunia.¹⁸⁾

16) Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

17) Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hal. 251.

18) Andi Zaenal Abidin, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, hal. 246.

- Roslan Saleh sependapat dengan Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dengan alasan bahwa dalam menghadapi "Perbuatan Pidana" tekanannya pada sifat perbuatan.¹⁹⁾

Kata "Feit" dalam bahasa Belanda dapat berarti fakta, kenyataan atau peristiwa.²⁰⁾ Tetapi bila kita gunakan istilah "peristiwa pidana" maka dirasakan terlalu luas, oleh karena peristiwa itu dapat terjadi karena hal-hal selain perbuatan manusia, misalnya saja kejadian alam dan sebagainya, sedangkan dalam "strafbaarfeit" menurut ilmu hukum pidana hanyalah menyangkut perbuatan manusia, dengan pengertian bahwa "handeling" atau perbuatan itu dapat bersifat aktif, artinya manusia itu berbuat, dan dapat bersifat pasif, artinya manusia itu tidak berbuat. "Starfbaarfeit" atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "tindak pidana" diartikan secara berbeda-beda bagi mereka yang berpandangan monistis dan yang berpandangan dualistis. Bagi pengikut aliran monistis yang dimaksudkan dengan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan perkataan lain, seorang yang melakukan

19) Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 23

20) J.C.T.Simorangkir, 1983, *Kamus Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 49.

tindak pidana dapat dipidana, sedangkan bagi yang beraliran dualistis, seorang yang melakukan tindak pidana belum tentu dapat dipidana, karena masih harus dilengkapi dengan syarat kesalahan dan pertanggungjawaban pada diri pelakunya. Walaupun pada akhirnya, yaitu untuk menentukan dijatuhkannya pidana kedua aliran itu tidak mempunyai perbedaan prinsipil, orang perlu menjelaskan dengan tegas apa yang dimaksudkan dengan tindak pidana itu, menurut yang monistis ataukah yang dualistis. Pemisahan *criminal act* dan *criminal responsibility* oleh penganut aliran dualistis sejalan dengan azas *ACTUS NON FACIT REUM, NISI MENS SIT REA* (/ *an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*). *MENS REA* atau *guilty mind* itulah yang merupakan "criminal intent" atau sikap batin yang jahat.

SOEDARTO melihat adanya dua kelompok sarjana yang berpendirian atau berpandangan *monistis* yaitu melihat semua unsur-unsur dari tindak pidana itu sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga memungkinkan dijatuhkan pidana kepada pelakunya, dan mereka yang berpandangan dualistis yang memisahkan perbuatan dengan pelakunya;²¹⁾ artinya jika perbuatan itu telah

21) Soedarto, 1987, *Hukum Pidana I*, Semarang, Fak. Hukum UNDIP, hal. 45

memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan undang-undang, maka perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana, tentang masalah dapat dipidananya pelaku, masih harus ditinjau secara tersendiri apakah pelaku itu memenuhi kualifikasi tertentu, sehingga ia dapat dijatuhi pidana. Dengan perkataan lain mereka yang berpandangan dualistis memisahkan antara perbuatannya yang jahat dan pertanggungjawaban pelakunya, atau memisahkan antara "*criminal act*" dan "*criminal responsibility*"

Selanjutnya SOEDARTO mengatakan bahwa kedua pendirian itu pada akhirnya, yaitu dalam keputusan untuk menjatuhkan pidana atau tidak adalah sama saja, oleh karena semua unsur baik menurut pendirian yang monistis maupun dualistis haruslah terdapat di dalamnya agar dapat diputuskan untuk mengenakan tindak pidana. Pandangan yang dualistis memiliki manfaat guna mempertajam pengertiannya, yaitu apakah syarat-syarat tertentu itu melekat pada perbuatannya ataukah pada pelakunya.²²⁾

SIMONS mengatakan bahwa tindak pidana adalah "*eenstrafbaarfeit gestelde, onrechtmatige,*

²²⁾ *Ibid.*, hal. 55

met schuld verband handeling van een toerekeningsvatbaar persoon"²³⁾

Di sini dapat dilihat unsur-unsurnya adalah :

- a) *handeling*, artinya perbuatan manusia baik yang positif maupun negatif, yaitu baik berbuat atau tidak berbuat/membiarkan (nalaten);
- b) *strafbaar gesteld*, artinya diancam dengan pidana;
- c) *onrechtmatig*, artinya melawan hukum;
- d) *met schuld*, artinya dilakukan dengan kesalahan (*dolus* maupun *culpa*);
- e) *teorekening vatbaar person*, artinya orangnya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

VAN HAMEL memberikan tambahan unsur dapat atau patut dipidana, dengan rumusan *strafbaarfeit* adalah "*rechtswettelijk omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*."²⁴⁾ Unsur-unsurnya :

- a) *menschelijke gedraging*, artinya perbuatan manusia;
- b) *rechtswettelijk omschreven*, artinya yang dirumuskan dalam undang-undang;

²³⁾Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana* (Kumpulan Kuliah), Balai Lektur Mahasiswa, hal. 74

²⁴⁾Soemitro, 1991, *Hukum Pidana I*, Surakarta : UNS Press, hal. 42.

- c) *onrechtmatig*, artinya dilakukan secara melawan hukum;
- d) *aan schuld te wijten*, artinya dilakukan dengan kesalahan, dan
- e) *stragvaardig*, artinya patut dipidana.

E. MEZGER mengatakan tindak pidana adalah "*der Inbegriff der Voraussetzungen der Strafe*", atau "keseluruhan syarat untuk adanya pidana". Dan selanjutnya dikatakannya, "*Die Straftat ist demnach tatbestandlich rechtswiedrige, personlich zurechenbare strafbedrohte Handlung*"²⁵⁾ Yang unsur-unsurnya adalah :

- a) *Handlung* (perbuatan manusia dalam arti yang luas);
- b) *Rechtswiedrig* (bersifat melawan hukum);
- c) *Personlich zurechenbaar* (dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang);
- d) *Strafbedroht*, (diancam dengan pidana).

KARNI mengatakan : Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.²⁴⁾

²⁵⁾ Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STH, Bandung, hal. 57.

WIRJONO PRODJODIKORO merumuskan definisi pendek ialah : Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.²⁶⁾

Dari rumusan-rumusan di atas tampak bahwa semua unsur-unsur yang memungkinkan seorang dijatuhi pidana dikumpulkan menjadi satu, dan tidak dipisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Dengan perkataan lain mereka ini adalah yang berpandangan monistis.

Di bawah ini akan dikemukakan rumusan dari mereka yang berpandangan dualistis, yaitu yang memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*, dan bila kedua bagian itu bersatu barulah dapat dijatuhkan pidana.

H.B. VOS merumuskan : *Een strafbaarfeit in een menselijke gedraging waarop door de wet straf is gesteld.*²⁷⁾

Unsur-unsurnya adalah :

- a) *Menselijke gedraging* (kelakuan manusia)
- b) *door de wet straf is gesteld* (diancam pidana oleh undang-undang dalam pengertian kelakuan yang pada umumnya dilarang oleh undang-undang, kecuali bila terdapat dasar untuk menghapuskan).

26) Soemitro, Loc.Cit., hal. 42

27) Ibid., hal. 43

POMPE merumuskan tindak pidana itu secara teoritis : suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan dengan kesalahan oleh pelaku, ancaman pidana terhadap pelaku itu perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Disamping itu, menurut hukum positif : tindak pidana tidak lain adalah suatu "*feit*" yang di dalam ketentuan perundang-undangan diancam pidana.

Menurut LAMINTANG, perbedaan antara teori dan hukum positif oleh POMPE tersebut bersifat semu, karena bagi teori yang terpenting adalah tidak seorangpun dapat dipidana kecuali bila tindakannya itu benar-benar melanggar hukum dan dilakukan dengan kesalahan, sedang hukum positif juga tidak mengenal adanya kesalahan tanpa adanya sifat melawan hukum. Dan ini dapat dipersatukan bila kita ingat azas "*geen straf zonder schuld*" atau tiada pidana tanpa kesalahan.²⁸⁾

Dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin dapat dijatuhkan pidana bila hanya ada "*strafbaarfeit*" saja tanpa adanya "*strafbaar persoon*" (orang yang dapat dipidana).

²⁸⁾ Lamintang, 1982, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hal. 173

MOELJATNO memberikan arti perbuatan pidana (istilah yang beliau pakai), sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur :

- a) Perbuatan manusia;
 - b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formalnya);
 - c) Bersifat melawan hukum (syarat materialnya).²⁹
- Syarat formal harus ada karena adanya pasal 1 KUHP (azas legalitas), dan syarat material diperlukan karena perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelakunya tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal itu melekat pada orangnya. Untuk dapat menjatuhkan pidana, tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan pidana, disamping itu orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Berdasarkan rumusan pengertian tindak pidana dari pakar di atas baik yang berpandangan monistis ataupun dualistis sebagian besar

29) Moeljatno, 1980, *Asas-asas Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta.*

mensyaratkan bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia misalnya :

- Simons : perbuatan manusia baik yang positif maupun negatif yang diancam dengan pidana.
- Van Hamel : perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.
- Mezger : perbuatan manusia dalam arti yang luas.
- Karni : perbuatan manusia yang sempurna akal budi.
- Vos : kelakuan manusia yang diancam pidana oleh undang-undang.
- Moeljatno : perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang.

Jadi menurut pendapat para ahli hukum di atas yang dapat melakukan tindakan pidana hanyalah manusia (berdasarkan rumusan definisi tindak pidana yang mereka kemukakan) menurut hemat penulis definisi ini bersifat sempit karena hanya membatasi tindak pidana pada manusia semata sehingga tidak memungkinkan korporasi (badan hukum) untuk dimasukkan sebagai pelaku tindak pidana.

Rumusan definisi tindak pidana yang luas dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dengan mengemukakan bahwa tindak pidana adalah "perbuatan yang pelakunya dapat dikenai pidana".

Rumusan itu tidak membatasi pelaku kepada orang tetapi bersifat luas karena pelaku tindak pidana bisa orang atau yang lainnya (badan hukum).

Definisi tindak pidana yang luas dikemukakan juga oleh Pompe dengan rumusan tindak pidana sebagai pelanggaran norma yang dilakukan dengan kesalahan oleh pelaku, tanpa memberi pembatasan pelaku harus seorang manusia.

Rumusan tindak pidana Wirjono Prodjodikoro dan Pompe di atas pada era sekarang relatif lebih dapat diterima dalam rangka kriminalisasi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi karena kedua ahli ini tidak mensyaratkan bahwa tindak pidana itu haruslah dilakukan oleh manusia, sehingga hal ini dapat diartikan secara negatif bahwa tindak pidana itu dapat juga dilakukan oleh badan hukum (korporasi).

2. Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara masalah pertanggungjawaban korporasi dalam suatu tindak pidana maka akan lebih dapat dipahami secara benar dan baik

apabila terlebih dahulu kita melihat pertanggungjawaban pidana secara umum kemudian barulah nanti masuk ke wilayah yang lebih khusus yaitu pertanggungjawaban korporasi.

Seperti telah disebutkan di muka, yaitu dalam pengertian tindak pidana (perbuatan pidana, *strafbaarfeit, delict*), untuk dapat dipidanya seseorang diperlukan beberapa syarat tertentu. SOEDARTO, berpendapat bahwa lepas dari pendirian yang bersifat monistis dan dualistis, pada akhirnya untuk menentukan adanya tindak pidana kedua pendirian itu tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil. Yang penting adalah bahwa semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap.³⁰⁾

Berbagai pendapat dari para sarjana mengenai unsur-unsur tindak pidana mengandung hal-hal yang ada persamaannya, sehingga dapat kita pakai sebagai pegangan pendapat SOEDARTO, mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- 1) Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang
(dalam hal ini adalah ketentuan pidana);
- 2) Bersifat melawan hukum (dalam hal ini tidak

30) Sudarto dan Wonosutanto, 1987, Catatan Kuliah Hukum Pidana II, Program Kekhususan Hukum Kepidanaan, FH UMS, Surakarta.

ada alasan pembenar atau *rechtsvaardigingsgrond*);

- 3) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahan (*schuld*) baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) dan tidak ada alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond*.

Syarat 1 dan 2 tersebut di atas dapat dikatakan sebagai syarat obyektif dari tindak pidana, karena hal itu dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam KUHPidana dan perundang-undangan lainnya, sedangkan syarat 3 merupakan syarat subyektif dari tindak pidana, karena hal ini menunjukkan kepada keadaan si subyek atau pelaku yang melakukan perbuatan, dan menyangkut segi kejiwaan dari si pelaku (pertanggungjawaban, kesalahan, kesengajaan, kealpaan).

Schaffmeister yang menggunakan istilah "perbuatan pidana" merumuskan pengertian perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang termasuk ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Perbuatan manusia dalam hal ini meliputi melakukan atau tidak melakukan perbuatan (pengertian berbuat meliputi aktif dan pasif) dapat dipidana.

Menurut Schaffmeister pengertian manusia di sini termasuk didalamnya adalah badan hukum.

Dalam lingkup rumusan delik, dimaksudkan bahwa perbuatan itu harus memenuhi semua unsur yang tertulis dalam rumusan delik.

Bersifat melawan hukum, suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang tertulis dalam rumusan delik agar dapat dijatuhi pidana harus bersifat melawan hukum baik bersifat sengaja maupun alfa.

Dapat dicela, suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang ditulis dan juga bersifat melawan hukum, tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Misalnya kalau ia dapat dimaafkan karena kesesatan.³¹⁾

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana ini berarti mengenai jantungnya Hukum Pidana, demikian dikatakan oleh Idema.³²⁾

Sejalan dengan itu menurut Sauer ada trias, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu :

31) D.Schaffmeister, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hal. 27

32) Sudarto, 1997, *Hukum Pidana I*, FH. UNDIP, Semarang, hal. 86

- a) Sifat melawan hukum (*unrecht*);
- b) Kesalahan (*schuld*); dan
- c) Pidana (*straf*).³³⁾

Menurut Roeslan Saleh dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk dalam hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanyalah menunjukkan kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.³⁴⁾

Berhubungan dengan hal itu Sudarto menyatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau

33) Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, hal. 6

34) Roslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 75.

bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Di sini berlaku apa yang disebut asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*keine strafe ohne schuld* atau *geen strafzonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), *culpa* di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.³⁵⁾ Dalam hukum pidana Inggris asas ini dikenal dalam bahasa latin yang berbunyi "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*)³⁶⁾

Asas tersebut di atas tidak tercantum dalam KUH Pidana atau dalam peraturan lain (asas tidak tertulis), akan tetapi berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan lagi. Akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang bunyinya :

"Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana

35) Sudarto, Op. Cit., hal. 85

36) Moeljatno, Op.Cit. hal. 3

kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapatkan keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.³⁷⁾

Dari bunyi pasal tersebut jelas, bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang yaitu berupa penjatuhan pidana. Sehubungan dengan hal tersebut Sudarto menyatakan untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada si pembuat. Asas tiada pidana tanpa kesalahan yang telah disebutkan di atas mempunyai sejarahnya sendiri. Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana yang menitik beratkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya (*Tatstrafrecht* atau *Erfolgstrafrecht*) ke arah hukum pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana (*Tatstrafrech*) tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari *Tatstrafrech*. Dengan demikian hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut sebagai "*Tatstrafrech*" ialah hukum pidana yang berpijak

37) CST. Kansil, 1986, *Kitab Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 11.

pada perbuatan maupun orangnya. Hukum pidana dewasa ini dapat pula disebut sebagai *Schulstrafrecht*, artinya bahwa unsur penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan pada si pembuat.³⁸⁾

Moeljatno dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana, masalah pertanggungjawaban pidana adalah demikian pentingnya. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana Orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu perbuatan tidak mungkin dikenakan pidana, sekalipun banyak orang mengerti, misalnya, bahwa perangai atau niatnya orang itu buruk, sangat kikir ...³⁹⁾

Sebagai contoh untuk hal yang kedua, yaitu bahwa meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dapat dipidana, adalah seorang anak bermain korek api di pinggir rumah tetangga, lalu menyalakan korek dan berakibat kebakaran (pasal 187 atau 188 (1) KUHP) tidak seorangpun yang akan mengajukan anak tersebut ke muka hakim pidana

38) Sudarto, Op. Cit., hal. 85

39) Moeljatno, Op. Cit., hal. 105

untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya. Contoh lain adalah orang gila yang tanpa disangka-sangka menyerang seorang lain.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dari kedua unsur lainnya istilah bahasa Belanda yang dipakai adalah "*toerekeningsvatbaarheid*" tetapi POMPE menggunakan istilah "*toerekenbaar*".⁴⁰⁾

Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksudkan dalam ilmu hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum menjatuhkan pidanalah yang menjadi pokok permasalahan.

Menurut Simons "kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dari sudut umum maupun dari orangnya", selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab (jiwa tidak cacat), apabila :

- Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya

40) Lamintang, Op. Cit., hal. 376.

bertentangan dengan hukum;

- Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi. 41)

Gambaran SIMONS ini memperlihatkan bahwa "*toerekeningsvatbaarheid*" adalah "kemampuan".

Pakar hukum pidana yang lain yakni Van Hamel memandang, "kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan, yang membawa tiga kemampuan, yaitu :

- 1) Mengerti akibat/nyata perbuatan sendiri;
- 2) Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban);
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya untuk berbuat. 42)

POMPE memberikan batasan tentang kemampuan bertanggung jawab dengan kriteria :

- 1) Kemampuan berfikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya;
- 2) Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah laku;
- 3) Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai

41) Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.Cit., hal. 58.

42) Ibid.

dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).⁴³⁾

POMPE tidak mau menggunakan kriteria "normalitas" karena pengertian normal itu kabur, tidak dapat ditentukan secara kuantitatif. Tetapi sebenarnya pengertian "kemampuan bertanggung jawab" sendiri bukankah juga tidak memiliki batas yang jelas.

Memori van Toelichting (M.v.T)⁴⁴⁾ tidak menerangkan tentang *toerekeningsvatbaarheid* tetapi dijelaskan secara negatif, atau bukan menjelaskan tentang apa itu mampu bertanggung jawab, melainkan apa itu "tidak mampu bertanggung jawab" atau tidak ada kemampuan bertanggung jawab. Tidak ada kemampuan bertanggung jawab pada pelaku apabila :

- 1) Dalam hal pelaku tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintahkan (dengan perkataan lain dalam hal perbuatan yang dipaksa).
- 2) Dalam hal pelaku berada dalam suatu keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum

43) Lamintang, Op. Cit., hal. 38

44) Soemitro, Op. Cit., hal. 97

dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu. (Jadi misalnya adanya nafsu patologis, gila, pikiran tersesat dan sebagainya).

Menurut SOEDARTO definisi atau batasan tentang kemampuan bertanggungjawab itu ada manfaatnya, tetapi setiap kali dalam kejadian kongkrit dalam praktek peradilan, menilai seorang terdakwa dengan ukuran tersebut di atas tidaklah mudah.⁴⁵⁾ sebagai dasar dapatlah dikatakan bahwa orang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu untuk menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia berbuat sesuai dengan pikiran dan perasaannya itu. Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap mampu bertanggung jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. Oleh karena itulah maka perumusan dalam Pasal 44 dinyatakan secara negatif.

Ketentuan undang-undang ini tidak memuat apa yang dimaksud dengan "tidak mampu bertanggungjawab", yang ada adalah alasan yang terdapat pada pelaku tindak pidana yang mengakibatkan perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, alasan tersebut

45) Ibid., hal. 98

berupa keadaan pribadi pelaku, secara biologis, dan dirumuskan dengan perkataan "jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit".

Pasal 44 (1) KUHPidana berbunyi : "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu (jiwanya) karena penyakit, tidak dipidana". Teks aslinya berbunyi : *Nietstrafbaar is hijdie een feit bagaat dat hen wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stroring zijner varatandelijke vermogens niet kan wonder toegerekend*".⁴⁶⁾

Menurut KUHPidana itu maka hal tidak mampu bertanggungjawab itu adalah karena sesuatu hal tertentu, yaitu jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, dan sebagai akibatnya ia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Jadi boleh dikatakan bahwa ada dua hal yang terdapat dalam pasal 44 (1) tersebut, yaitu :

- Menentukan bagaimana keadaan jiwa si pelaku, hal ini selayaknya ditetapkan oleh seorang ahli, dalam hal ini seorang psikiater, jadi

46) Lamintang, Op. Cit., hal. 377

secara deskriptif.

- Menentukan hubungan sebab akibat antara keadaan jiwa tersebut dengan perbuatannya, penentuan ini bersifat normatif, dan dilakukan oleh hakim.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KUHPidana kita menempuh sistem *deskriptif-normatif* dalam menentukan tidak dapatnya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dengan cara ini maka untuk menentukan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggungjawab diperlukan kerjasama antara dokter jiwa (psikiater) dengan hakim. Psikiater yang menentukan ada atau tidak adanya penyebab yang tercantum dalam pasal 44 (1), sedangkan hakim yang menilai apakah karena penyebab tersebut terdakwa mampu bertanggungjawab atau tidak, sehingga dapat dipidana atau tidak. Sekarang ada yang perlu dipertanyakan, yaitu : Apakah kemampuan bertanggungjawab itu merupakan unsur tindak pidana?

Mereka yang berpegangan pada dualistis maka dipisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawab pidana, artinya dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab ataupun tidak mampu bertanggungjawab, maka jika perbuatannya memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat

melawan hukum (tidak ada alasan pembeda), maka terjadilah tindak pidana. Sedangkan mereka yang berpegangan pada pandangan monistis maka tindak pidana itu meliputi pertanggungjawaban, jadi perbuatan dan pertanggungjawaban. Konsekuensinya maka kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur tindak pidana. Selanjutnya ini berarti bahwa jika kemampuan bertanggungjawab tidak ada, maka tidak ada tindak pidana. SIMONS yang menganut pandangan monistis tidak menyinggung masalah konsekuensi tersebut di atas, tetapi dikatakannya bahwa dalam hukum positif kemampuan bertanggungjawab tidak dipandang sebagai unsur tindak pidana, melainkan sebagai keadaan pribadi seseorang yang dapat menghapus pidana seperti tersebut dalam Pasal 58.⁴⁷⁾

Memang dalam praktek pengadilan diikuti pendapat SIMONS tersebut, yaitu bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak dipandang sebagai unsur pidana, melainkan sebagai keadaan pribadi yang dapat menghapus pidana. Yurisprudensi juga menunjukkan hal yang serupa. Putusan Hoge Raad tanggal 10 Nopember 1924 mengatakan bahwa "*Toerekeningsvatbaarheid*" (kemampuan bertanggung-

47) Muladi dan Dwidja Priyatno, Op. Cit., hal. 50

jawab) bukanlah merupakan suatu unsur tindak pidana yang oleh karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, tetapi jika unsur itu tidak ada, maka ada alasan penghapusan pidana". Mengenai hal ini POMPE mengatakan bahwa :⁴⁸⁾

"Mampu bertanggungjawab itu bukanlah unsur tindak pidana tetapi terdapat pada sejumlah manusia. Keadaan yang demikian itu adalah keadaan normal, walaupun belum jelas benar. Tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti yang dirumuskan dalam pasal 44 KUHPidana itu adalah alasan penghapusan pidana.

B. Pengertian Korporasi dan Kedudukan Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana

1. Pengertian Korporasi

Kata korporasi berasal dari kata "*Corporatio*" (Latin), *Corporatie* (Belanda), *Corporation* (Inggris), *Korporation* (Jerman)". Akhiran "*tia*" dari kata benda yang berasal dari kata kerja "*Corporare*" yang berarti banyak dipakai orang jaman abad pertengahan atau sesudah itu. "*Corporare*" sendiri berasal dari kata "*Corpus*" (Indonesia=badan), yang berarti

⁴⁸⁾ Lamintang, Op. Cit., hal. 38

memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka akhiran "*Corporatio*" itu berasal hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia. Korporasi adalah kesatuan yang disamakan dengan manusia.⁴⁹⁾

Apabila suatu badan hukum memungkinkan untuk menjadikan badan itu di samping manusia, dengan mana ia disamakan maka itu berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau sulit untuk dicapai.

Menurut Satjipto Rahardjo hukum tidak hanya memikirkan manusia sebagai subyek dalam hukum melainkan juga bukan orang. Di samping manusia, hukum masih membuat kontruksi fiktif yang kemudian diterima, perlakukan dan dilindungi seperti halnya ia memberikan perlindungan terhadap manusia. Kontruksi yang demikian menurut Satjipto Rahardjo disebut badan hukum. Hukum mempunyai kebebasan menciptakan kontruksi yang berasal dari imajinasinya. Bagaimanapun juga perluasan fiktif tersebut tentulah dimaksudkan

49) Mardjono Reksodiputro, 1993, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya*, Jakarta, PTIK.

untuk mencapai tujuan tertentu dan dalam rangka itulah hukum menciptakan suatu kepribadian yang baru tersebut. Badan yang diciptakan itu terdiri dari *Corpus* (struktur fisiknya) dan *animus* (jiwa), sehingga badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.⁵⁰⁾

Korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak oleh hukum dan diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.⁵¹

Corporatie atau korporasi menurut kamus hukum karangan Subekti dan Tjitrosudibio, adalah merupakan perseroan yang merupakan badan hukum.⁵²⁾

Yan Pramadya Puspa menyatakan : Korporasi atau badan hukum adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum, korporasi atau perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban

50) Satjipto Rahardjo, (1996), *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 69.

51) A.Z. Abidin, (1983), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, hal. 54.

52) Subekti dan R.Tjitrosudibio, (1979), *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hal. 34.

memiliki hak menggugat ataupun digugat dimuka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (Perseroan Terbatas), N.V. (*Namloze Vennootschap*) dan Yayasan (*Stichting*), bahkan negarapun juga merupakan badan hukum.⁵³⁾

Adapun pengertian korporasi dalam Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan yang dihimpun oleh A. Abdurachman menyatakan :

Corporatio (korporasi perseroan) adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang sesuatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktivitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya atau untuk sesuatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas yang dengan nama dan identitas itu dapat dituntut di muka pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut undang-undang suatu negara. Pada umumnya suatu corporation dapat merupakan suatu

53) Yan Pramadya Puspa, (1997), *Kamus Hukum*, Semarang, CV. Aneka, hal. 256.

organisasi pemerintah setengah pemerintah atau partikelir.⁵⁴⁾

Kata "Korporasi" adalah sebutan yang lazim dipergunakan para pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum yang dalam bahasa Belanda disebut "*rechtspersoon*" atau yang dalam bahasa Inggris disebut "*legal entities*" atau "*corporation*"⁵⁵⁾

Korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang manusia yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota-anggota mana juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.⁵⁶⁾

Sebagai badan hukum keperdataan korporasi dirinci dalam beberapa golongan, dilihat dari cara mendirikan dan peraturan perundang-undangan sendiri, yaitu :

54) A. Abdurachman, (1963), *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* (Jilid I), Jakarta, Prafanea, hal. 246.

55) Rudi Prasetyo, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangan*, Makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH.UNDIP, (Semarang : 23-24 Nopember, 1989, hal. 2)

56) Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hal.64

1. Korporasi *egoistis* yaitu korporasi yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan, misalnya Perseroan Terbatas, Serikat Pekerja;
2. Korporasi yang *altruistis*, yaitu korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang memperhatikan nasib orang-orang tuna netra, tuna rungu, penyakit TBC, penyakit jantung, penderita cacat, Taman Siswa, Muhammadiyah dan sebagainya.⁵⁷⁾

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas ternyata dalam hukum perdata (dagang) bahwa korporasi adalah badan hukum.

Badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu yang riil, merupakan fakta benar-benar, dalam pergaulan hukum, biarpun tidak terwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya, yang menjadi penting bagi pergaulan

57) Muladi dan Dwidja Priyatno, Op. Cit., hal. 15

hukum adalah badan hukum itu mempunyai kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya, yaitu dalam hal badan hukum itu berupa korporasi. Hak kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dari hak kewajiban anggotanya. Bagi bidang perekonomian, terutama lapangan perdagangan, gejala ini sangat penting.⁵⁸

Dalam sejarah perkembangan peraturan yang mengatur badan hukum di Indonesia dikenal :

- 1) Peraturan perundang-undangan tentang badan hukum yang tunduk pada hukum perdata menurut KUH Perdata (B.W. INDONESIA):
 - a) BAB IX Buku KUH Perdata dimulai dari pasal 1653 yang mengatur tentang *zedelijke leichamen* yaitu badan-badan susila dan sekarang disebut badan hukum;
 - b) Stb. 1870 No. 64 : *Rechtspersoonlijkeheid Van Vereniging* (kepribadian hukum dari perkumpulan artinya badan hukum itu mempunyai kedudukan sebagai subyek hukum);
 - c) Stb. 1927 No. 156, *Regeling van de Rechtspositie der Kerkgenootschappen*;
 - d) Bab II bagian 3 KUH Dagang (W.v.K) menurut Stb. 1938 No. 276 tentang perseroan Terbatas.

58) Chidir Ali, Op. Cit., hal. 18-19.

- e) Pasal 286 KUH Dagang tentang Perusahaan Asuransi yang merupakan badan hukum;
 - f) Stb. 1926 No. 377, tentang Dana Buruh.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Hukum yang tunduk baik pada hukum adat maupun KUH Perdata (B.W. Indonesia) :
- a) Stb. 1939 No. 569, *Ordonnantie op de Inlandsche Maatschapij op Aandelen* (tentang I.M.A);
 - b) Stb. 1938 No. 570, *Ordonnantie op de Inlandsche Vereniging* (tentang Perhimpunan Bumiputera);
 - c) Stb. 1939 No. 571, *Ordonnantie op de Gerechtelijke Vereniging van Inlandsche Rechtspersonen*.⁵⁹⁾

Badan hukum tersebut di atas sering disebut sebagai badan hukum perdata (badan hukum privat). Di samping itu kita mengenal pula badan hukum publik yaitu jika terhadap badan ini disamping hukum Perdata berlaku pula hukum publik (Hukum Administrasi Negara), termasuk dalam hal ini, misalnya badan-badan negara, propinsi, atau daerah Tingkat II/Kotamadya. Jika terhadap badan

59) Muladi dan Dwidja Priyatno, Op. Cit., hal. 17.

ini berlaku hukum publik (Hukum Administrasi Negara), maka berlakunya itupun hanya sekedar intern. Sekedar intern pengaturan mengenai organisasi dan kewenangannya sedangkan secara ekstern dalam hubungannya dengan pihak ketiga sepanjang perbuatan yang menyangkut kedudukan badan tersebut sebagai penguasa yang mengatur administrasi negara maka secara ekstern apakah badan hukum publik atau perdata kedudukannya sederajat sebagai para pihak. Misalnya dalam hal badan hukum publik sebagai pemberi kerja terhadap pemborong (kontraktor), wajib badan hukum publik ini memenuhi kewajibannya atas segala janji-janji yang ditentukan dalam kontrak.⁶⁰⁾

Sebagai badan hukum, maka pendiriannya harus memenuhi beberapa persyaratan. Misalnya suatu P.T. untuk mendapatkan status sebagai badan hukum perlu dipenuhi beberapa persyaratan yaitu :

- 1) P.T. harus didirikan dengan akta otentik, yaitu akta Notaris (Pasal 38 KUH Dagang), oleh paling sedikit dua orang. Akta pendirian itu mengandung Anggaran Dasar yang memuat aturan-aturan tentang bagaimana P.T. itu akan diatur, diurus (dikelola) menurut batas-batas yang ditetapkan oleh undang-undang;

60) Rudi Prasetyo, Op. Cit., hal. 5

- 2) Sebelum suatu P.Tp bisa berdiri dengan sah, maka akta pendiriannya atau naskah/rancangan akta itu harus disampaikan lebih dahulu kepada Menteri Kehakiman, untuk memperoleh persetujuan/izinnya, yang dikenal dengan sebutan pengesahan (Pasal 36 ayat (2) KUH Dagang);
- 3) Para persero dalam P.T. (biasanya diwakili oleh direksinya atau kuasa yang ditunjuk dalam akta pendirian), berkewajiban mendaftarkan akta pendirian dan perubahannya dalam Register Umum yang tersedia di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di mana P.T. itu bertempat kedudukan, dan mengumumkannya dalam Berita Negara. (Pasal 38 ayat (2), (3) dan (4), Pasal 39 KUH Dagang).⁶¹⁾

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa korporasi menurut hukum perdata adalah merupakan badan hukum dengan bentuk yang bermacam-macam sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Untuk mendapatkan status badan hukum harus mendapatkan pengesahan akta pendiriannya dari pemerintah.

Pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas pengertiannya dibanding pengertian

⁶¹⁾ R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2000, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, Jakarta, Radaya Paramitha.

korporasi menurut hukum perdata. Menurut hukum pidana korporasi bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum, sedang menurut hukum perdata korporasi adalah badan hukum.

Undang-undang no. 5 tahun 1997 tentang psikotropika Pasal 1 butir 13 (ketentuan umum) menjelaskan bahwa korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang/kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan. Jadi jelas bahwa korporasi disini tidak harus berbadan hukum.⁶²⁾

Pasal 1 butir 19 Undang-undang Narkotika (UU no. 22 tahun 1997) memberikan definisi korporasi yang hampir serupa dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 13 UU Psikotropika yaitu :

Kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan.⁶³⁾

Dalam Pasal 51 WvS (*Wet Book van Straafrect*) Belanda sejak tahun 1976 ternyata juga memberikan rumusan yang luas mengenai korporasi.

1) Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum;

62) UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika

63) UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

2) Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana, dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan-tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap :

- a) Badan hukum atau;
- b) Terhadap mereka yang memerintahkan melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pemimpin melakukan tindakan yang dilarang itu, atau;
- c) Terhadap yang disebut di dalam a dan b bersama-sama.

3) Bagi pemakaian ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum perseroan tanpa hak badan hukum, perserikatan dan yayasan.⁶⁴⁾

2. Kedudukan Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana

Perkembangan korporasi di awal abad modern lebih dipengaruhi oleh bisnis perdagangan yang makin kompleks di benua Eropa, sehingga negara-negara Eropa mulai mendirikan serikat-serikat dagang yang merupakan embrio dari korporasi modern sekarang seperti :

⁶⁴⁾ Schaffmeister, (1995), *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hal. 273 (terjemahan).

- *The English East India Company* --- Inggris
- *The Muscovy Company* --- Rusia
- *The Turkey or Levant Company* --- Turki
- *Verenigde Oost Indische Company* --- Belanda

Bentuk korporasi modern di Inggris dikenal dengan nama *Hudson's Bay Company* yang diresmikan oleh Raja Inggris pada tahun 1670, yang beroperasi di Canada, yang mempunyai hak monopoli di bidang perdagangan sebagai sumber dana dari pemerintah kolonial Inggris.⁶⁵⁾

Dengan terjadinya Revolusi Industri di Inggris maka perkembangan di bidang teknologi industri pemintalan benang dan Revolusi di bidang tenaga dengan ditemukannya mesin uap, maka diperlukan suatu modal yang besar dengan organisasi yang mapan serta perangkat hukum yang memadai, maka pada tahun 1855 mulai dikenal adanya pembatasan terhadap pertanggungjawaban korporasi. Pada tahun 1862 korporasi memakai nama untuk asosiasinya dan dibelakang nama tersebut sebagai tanda adanya pembatasan terhadap pertanggungjawaban korporasi dicantumkan kata "*limited*".⁶⁶⁾

65) M. Natsir Said, (1997), *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Allumni, Bandung, hal. 3

66) Muladi dan Dwidja Priyatno, Op. Cit., hal. 24.

Perancis baru memasukkan korporasi dalam "*Code de Commerce*" pada tahun 1807. Karena Perancis pernah menjajah Belanda maka jika kita hubungkan dengan pembuatan rancangan W.v.K. Nederland yang dibuat pada tahun 1809 atau tanggal 8 Juni 1809 dan kodifikasi "*Code de Commerce*" Perancis yang dibuat pada tahun 1808. Nampaklah waktunya sangat berdekatan dan dalam hubungan sebagai suatu negara yang dikuasai Perancis akan tercemin di dalam W.v.K. Nederland tersebut, sistem dan isi W.v.K. Nederland secara nyata mengacu pada "*Code de Commerce*"

Karena Indonesia merupakan jajahan Belanda maka setiap perubahan dan perkembangan aturan hukum yang terjadi di negara Belanda dengan asas konkordansi diperlakukan juga di Indonesia (Hindia Belanda saat itu). Dalam hal ini termasuk juga W.v.K. (lebih dikenal dengan nama KUU Dagang di Indonesia) dengan asas Konkordansi berlaku juga di Hindia Belanda bahkan sampai sekarang setelah Hindia Belanda merdeka dan berganti menjadi Indonesia.

Sesudah tahun 1838 bentuk-bentuk badan-badan usaha C.V. maupun Firma dan N.V. masing-masing diatur ddalam pasal 35 dan pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUH Dagang secara berturut-turut

karena perkembangan perekonomian mengalami banyak perubahan kecuali bentuk C.V. Di samping itu berkembang pula perusahaan-perusahaan Pemerintah sejak tahun 1925 yang didirikan berdasarkan I.C.W. Stb. 1925 Nomor 106 dan seterusnya dengan I.B.W. Stb. 1927 Nomor 419.⁶⁷⁾

Ternyata peranan korporasi makin penting sebagaimana dalam Konggres PBB ke VII, dalam tahun 1985 telah dibicarakan jenis kejahatan dalam tema "Dimensi Baru Kejahatan dalam Konteks Pembangunan", dengan melihat gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi di mana korporasi banyak berperan di dalamnya, seperti terjadinya manipulasi pajak, kerusakan lingkungan hidup, penipuan asuransi, pemalsuan *invoice* yang dampaknya dapat merusak sendi-sendi perekonomian suatu negara.⁶⁸⁾

Karena perkembangan dan pertumbuhan korporasi dampaknya dapat menimbulkan efek negatif, maka kedudukan korporasi mulai bergeser dari subyek hukum biasa menjadi subyek hukum pidana.

Pidana terhadap korporasi bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia.

67) M. Natsir Said, Op. Cit., hal. 3

68) Ibid., hal. 6

Menurut J.E. Sahetapy dalam penelitiannya pada tahun 1988 tentang permasalahan pidana denda dalam hukum adat Indonesia menyatakan, Soepomo menulis bahwa di beberapa daerah di kepulauan Indonesia, seringkali terjadi bahwa kampung si penjahat atau kampung terjadinya suatu pembunuhan atau pencurian terhadap orang asing, diwajibkan membayar denda atau kerugian kepada golongan familinya orang yang dibunuh atau yang kecurian.⁶⁹⁾

Pernyataan senada dikemukakan oleh Andi Zaenal Abidin, bahwa di sebagian daerah di Indonesia dahulu kala dikenal hukum Adat (Pidana) yang mengancam pidana bagi keluarga atau kampung seseorang yang dipersalahkan melakukan kejahatan. Hukum Adat Pidana mengenai pertanggungjawaban kolektif.⁷⁰⁾

Menurut Saepto Rahardjo, penempatan korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, bahwa semakin modern masyarakat dan politik yang terdapat disitu maka kebutuhan akan sistem pengendalian

69) J.E. Sahetapy, (1989), *Kejahatan Korporasi Ditinjau Dari Sudut Kriminologi*, Makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, 23 - 24 Nopember 1989, Semarang, FH. UNDIP.

70) A.Z. Abidin, Op. Cit., hal. 50

kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, melainkan dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang namun persoalan-persoalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya.⁷¹⁾

Tumbuhnya gabungan beberapa perusahaan yang dikenal dengan nama konglomerasi (perusahaan besar yang bergerak dibidang usaha yang bermacam-macam). Jenis perusahaan ini menyerupai gurita raksasa yang secara horisontal dan vertikal menguasai berbagai usaha. Begitu kompleksnya gabungan usaha ini sehingga kehadiran korporasi jenis ini benar-benar mengkhawatirkan utamanya bila digunakan secara negatif yaitu hanya semata-mata untuk meraih keuntungan kelompoknya tanpa memperdulikan kepentingan masyarakat banyak.

Dalam Hukum Positif di Belanda mulai mencantumkan korporasi sebagai subyek hukum Pidana. Pasal 15 ayat (1) *wet Economic Delicten*, 1950, yang kemudian dalam perkembangannya dalam Undang-

71) Satjipto Rahardjo, (1980), *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, hal. 3, 4.

undang tanggal 1 September 1976 merubah isi pasal 51 W.v.S. sehingga korporasi di negeri Belanda merupakan subyek hukum pidana umum, antara lain menghapus pasal 15 ayat (1) *Wet Economic Delicten*, 1950⁷²⁾

Subyek hukum pidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam Undang-undang Penimbunan Barang-barang. Mulai dikenal secara luas dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UU No. 7 Drt. Tahun 1955, juga kita temukan dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 11 PNPS tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi, dan pasal 49 Undang-undang No. 9 tahun 1976, Undang-undang tentang Tindak Pidana Narkotika. Sehingga dengan demikian korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia hanya kita temukan dalam perundang-undang khusus di luar KUHP. Yang merupakan pelengkap KUHP, sebab untuk Hukum Pidana Umum atau KUHP itu sendiri masih menganut subyek hukum pidana secara umum yaitu manusia, (Pasal 59 KUHP).⁷³⁾

72) Muladi dan Dwidja Priyatno, Op. Cit., hal. 30

73) Andi Hamzah, (1977), *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, hal. 48.

C. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi

Tindak pidana korporasi merupakan salah satu yang disebut Sutherland sebagai "*White Collar Criminals*" menurut Henderson serta "*occupational deviance*" dari Quinney. Douglas dan Johnson menyebut dengan "*official deviance*", Green menamakan dengan istilah "*occupational crime*" dan Clinard menyebut *white collar criminal* dengan istilah "*illegal corporate behavior*."⁷⁴⁾

Sutherland merumuskan "*white collar criminals*" sebagai, *legal violation in the course of his or her occupation*"⁷⁵⁾

Dari definisi tersebut mengindikasikan bahwa WCC adalah merupakan kejahatan kelas atas berkaitan dengan pendidikan, keuangan kedudukan sosial dan ekonomi sehingga kadang-kadang kejahatan jenis ini dikordinir, terorganisasi dan termanagemen dengan baik.

Kejahatan korporasi bukanlah tipe yang oleh konggres PBB ke 6 tahun 1980 disebut sebagai akibat dari ketimpangan sosial, diskriminasi rasial, diskriminasi nasional, standard hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk.

"The main couses of crime in many contries are social

⁷⁴⁾ J.E. Sahetapy, (1994), *Kejahatan Korporasi*, Bandung, hal. 2.

⁷⁵⁾ Ibid., hal. 11.

inequality, racial, and national discrimination, low standard of living, inemployment and illiteracy among broad section of the population"⁷⁶⁾

Faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan sebagaimana disimpulkan dari hasil konggres PBB ke 8 tahun 1990 Havana, Cuba antara lain :

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok/serasi;
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
- c. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga;
- d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan deskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan;

⁷⁶⁾ Barda Nawawi Arief, (1995), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya bakti, Bandung, hal.11

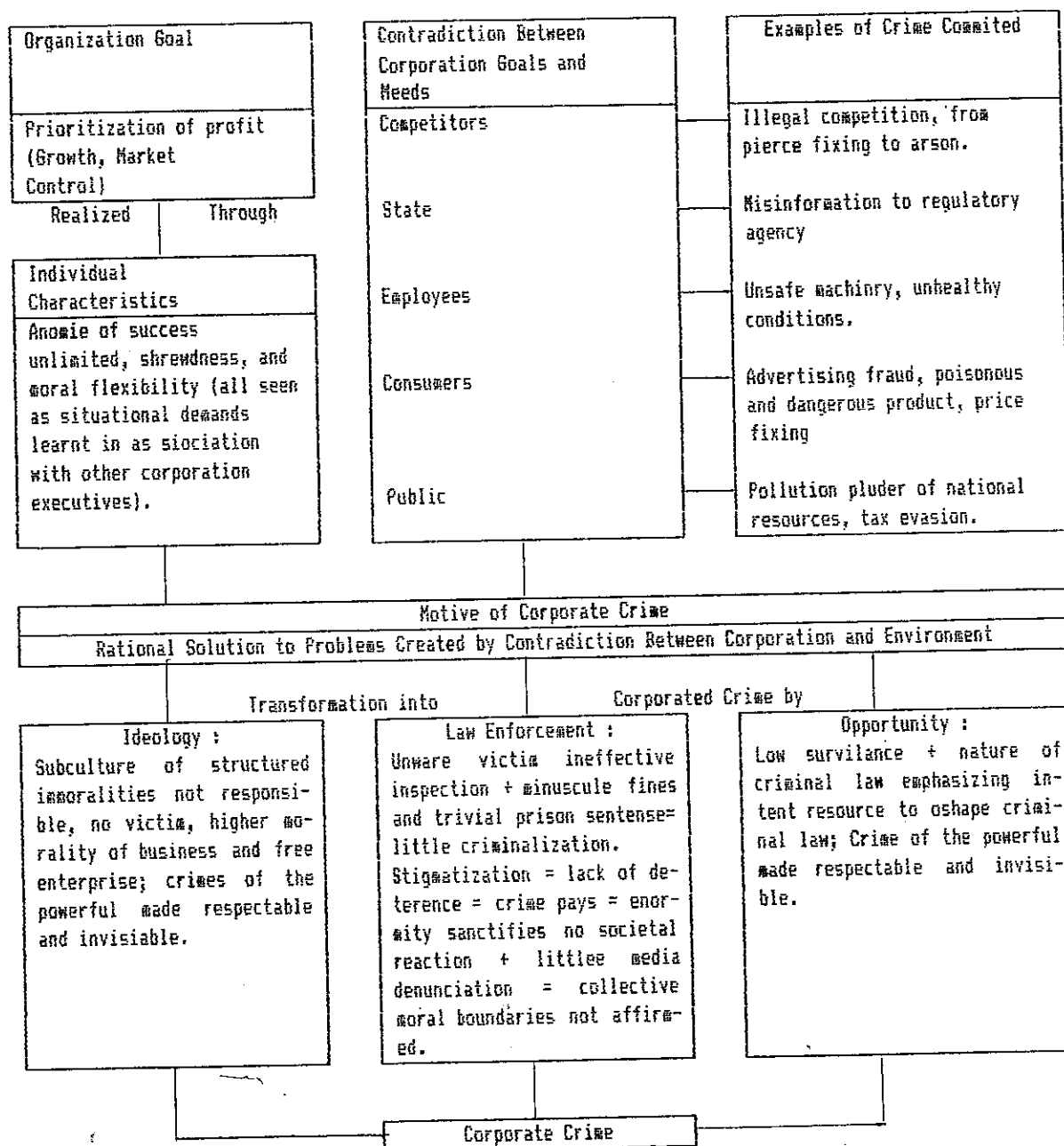
- f. Menurun atau mundurnya (*kualitas*) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (*tidak cukupnya*) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/ber-tetangga;
- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagai-mana mestinya di dalam lingkungan masyarakat-nya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya tau di lingkungan sekolah;
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas;
- i. Meluasnya aktivitas kejahatan yang ter-organisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian.⁷⁷⁾

Kondisi di atas merupakan lahan subur bagi korporasi untuk mengembangkan/melakukan kejahat-an, baik yang memang tujuan semula berbuat ke-jahatan maupun kejahatan korporasi dalam konteks mengejar laba sebesar-besarnya.

Kompleksnya kejahatan korporasi dapat dipahami dari tulisan Steven Box dalam bukunya "*Power, crime and mystification*" berikut ini :

⁷⁷⁾ UN Report, 1991, *Eight UN Conggres On The Prevention of Crime and The Threatment of Offender*, New York, UN.

Understanding Corporated Crime



Isi dari bagan Steven box di atas pada prinsipnya adalah :

- (a) Korporasi pada umumnya lebih mengutamakan pencapaian sasaran organisasi, yakni berupa laba (profit);
- (b) Pencapaian tujuan direalisasikan melalui karakteristik individual yang disebut anomie of success, yakni sukses atau ambisi tanpa batas yang dilakukan tanpa aturan; dan
- (c) Pencapaian tujuan korporasi kontradiksi dengan kebutuhan pesaing negara karyawan, konsumen dan masyarakat.

Is Susanto dengan mendasarkan kepada pendapat Kriesberg mengemukakan tiga model korporasi melanggar hukum :

- (1) Rational actor model, korporasi dilihat sebagai unit tunggal yang merupakan kepentingan korporasi;
- (2) Organization process model, korporasi dilihat sebagai suatu sistem unit-unit yang terorganisir secara longgar, dimana macam-macam unit korporasi mungkin tidak mematuhi hukum karena menghadapi kesulitan untuk dapat memenuhi produk yang ditargetkan, sehingga untuk memenuhi mereka melakukannya dengan melanggar hukum;

(3) Kejahatan korporasi merupakan produk dari keputusan-keputusan yang dibuat secara individual untuk kepentingan pribadi.⁷⁹

Dewasa ini korporasi di Indonesia menampilkan perkembangan yang semakin luas, besar, kaya dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan negara. Jutaan orang menggantungkan hidupnya dari korporasi, trilyunan uang yang masuk dari kegiatan yang berasal dari berbagai bidang usaha industri dan perdagangan barang - barang elektronika, obat-obatan, pakaian, makanan dan minuman, perkayuan, perkebunan, konstruksi, perbankan, dan lain-lainnya. Karenanya korporasi nampak sebagai pembawa nikmat hidup, pemberi lapangan kerja dan penyelamat masyarakat, sehingga gambaran tentang korporasi kebanyakan bersifat positif. Orang tidak mempertanyakan bahwa produk makanan tertentu dapat merugikan kesehatannya. Orang juga tidak mempertanyakan bahwa obat-obatan tertentu dapat merugikan kesehatannya. Demikian pula orang tidak pernah mempertanyakan mengapa mobil tertentu sering mengalami kecelakaan dan walaupun itu terjadi

⁷⁹) Is Susanto, 1999, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim ORBA*, BP UNDIP, Semarang, hal. 86 dan 87.

maka yang dianggap bersalah adalah pengemudinya karena kurang hati-hati.

Memasuki era industrialisasi dan informasi di sisi lain akan meningkatkan kegiatan korporasi yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan jiwa manusia, atau singkatnya meningkatkan kejahatan korporasi. Ini berarti bahwa kita semakin dituntut mewaspadaai kejahatan-kejahatan korporasi.

Melihat ciri kejahatan korporasi yang berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh perorangan, khususnya yang berupa kejahatan *warungan*, sehingga perlu dikembangkan teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini bukan saja karena korporasi merupakan organisasi, akan tetapi juga karena tujuan korporasi adalah untuk melakukan bisnis dan bukan untuk melakukan kejahatan, maka juga masalah "dengan maksud" (*mens rea*) tidaklah "semudah" bila dibandingkan dengan kejahatan *warungan*.

Dewasa ini paling tidak dikenal dua teori tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu :

a. Teori identifikasi

Teori identifikasi, yang menyatakan bahwa tindakan dari orang (personil korporasi) benar-

benar merupakan tindakan korporasi. Dasar dari teori ini adalah bahwa tanggung jawab adalah langsung dan bukan mewakili.

b. Teori imputasi

Teori imputasi, hakekat dari teori ini adalah "yang mewakili" (*vicarious liability*).

Berdasarkan pemikiran ini korporasi bertanggung jawab terhadap maksud dan tindakan pegawainya yang dipandang sebagai suatu kesatuan. Dalam konsep imputasi, maka hubungan pegawai dengan korporasi merupakan hal yang utama, artinya pegawai harus bertindak dalam ruang lingkup atau bagian dari pekerjaan untuk kepentingan korporasi.

Tanggung jawab korporasi juga diperluas dengan konsep "pengesahan" (*ratification*) dan "pemiaran" (*toleration*) oleh korporasi terhadap tindakan atau pola tindakan yang dilakukan oleh pegawainya.

Dengan melihat ciri-ciri tindakan korporasi, maka terhadap tindakan korporasi yang melanggar hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada :

- (a) Korporasi saja
- (b) Korporasi bersama-sama dengan pegawainya, atau
- (c) Pegawainya saja.⁸⁰⁾

⁸⁰⁾ Ibid., hal. 88

Muladi dan Dwidja Priyatna mengelompokkan menjadi tiga kategori pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut :

- Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
- Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
- Korporasi sebagai pembuat dan sebagai yang bertanggungjawab.⁸¹⁾

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan dasar pemikirannya adalah : korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

Ketentuan yang mengatur hal tersebut di atas dianut oleh KUHP, seperti misalnya pasal 169 KUHP, pasal 398 dan 399 KUHP berbunyi :

81) Muladi dan Dwidja Priyatna, Op. Cit., hal. 67.

Pasal 169 KUHP berbunyi :

- (1) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana paling lama enam tahun.
- (2) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga.⁸²⁾

Tindak pidana dalam Pasal 169 KUHP, merupakan tindak pidana Kejahatan terhadap Ketertiban Umum (Bab V Buku II KUHP), yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang. Apabila dilakukan oleh pengurus dan pendiri perkumpulan/korporasi tersebut, maka terdapat pemberatan pidananya yaitu terhadap pendiri atau pengurus suatu korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang—pidananya lebih berat bila dibandingkan dengan bukan pendiri atau pengurus. Sehingga yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana

⁸²⁾ R. Soesilo, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia.

adalah orang/pengurusnya dan bukan korporasi itu sendiri.

Pasal 398 KUHP, berbunyi :

Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan menyelesaikan oleh Pengadilan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

- 1) Jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar kerugian diderita oleh perseroan maskapai atau perkumpulan;
- 2) Jika yang bersangkutan dengan maksud untuk menanggukkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan, turut membantu atau mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahuinya tak dapat dicegah keadaan pailit atau penyelesaiannya;
- 3) Jika yang bersangkutan dapat dipermasalahkan tidak memenuhi kewajiban yang diterangkan dalam pasal 6 ayat pertama

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan pasal 27 ayat pertama Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia, atau bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut pasal tadi, tidak dapat diperlihatkan dalam keadaan tak diubah.⁸³⁾

Pasal tersebut di atas pun tidak membebankan tanggungjawab pidana pada korporasinya, akan tetapi kepada pengurus atau komisarisnya, hal serupa juga terdapat dalam ketentuan pasal 399 KUHP, yaitu merupakan tindak pidana yang menyangkut pengurus atau komisaris perseroan terbatas dan sebagainya yang dalam keadaan pailit merugikan perseroan.

Dari ketiga contoh pasal KUHP di atas ternyata bahwa pengaruh asas "*societies delinquere non potest*" sangat mewarnai, dalam hal ini hanya mengakui pelaku tindak pidana hanyalah manusia sedang badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus dituntut sebagai yang bertanggung jawab, yang dipandang

⁸³⁾ Moeljatno, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara.

dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Menurut Roeslan Saleh sifat dari perbuatan yang dijadikan tindak pidana itu adalah "*onpersoonlijk*". Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. Roeslan Saleh setuju bahwa prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran saja.⁸⁴⁾

Peraturan perundang-undangan yang menunjukkan korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab antara lain terhadap di dalam Pasal 19 UU No. 1 tahun 1951, tentang Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 No. 12 dari R.I. untuk seluruh Indonesia Pasal 30, Undang-undang No. 2 tahun 1951 tentang pernyataan Berlakunya Undang-undang tahun 1947 No. 33 dari R.I. untuk seluruh Indonesia, Pasal 4 Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1951 tentang Senjata Api, Pasal 34 Undang-undang No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.⁸⁵⁾

84) Roeslan Saleh, (1984), *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, BPHN, hal. 50.

85) Muladi dan Dwidja Priyatno, Op. Cit., hal. 70.

Ternyata hanya dengan menjatuhkan pidana terhadap pengurus korporasi sering masih menimbulkan problema. Dalam tindak pidana tertentu, khusus tindak pidana ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh Undang-undang itu.

Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan respresi terhadap delik-delik dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengurus atau pengurus saja.⁸⁶⁾

Alasan pembentuk Undang-undang yaitu Undang-undang No. 7 Drt. 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (TPE)

⁸⁶⁾ Ibid., hal. 71.

dapat dipidananya suatu korporasi seperti yang diungkapkan dalam penjelasan Pasal 15 TPE antara lain berbunyi :

Pasal 15 menetapkan bahwa hukuman atau tindakan dapat dijatuhkan juga terhadap badan-badan hukum, perseroan-perseroan, per-serikatanperserikatan dan yayasan-yayasan. Dalam hukum pidana ekonomi aturan itu sangat dibutuhkan, oleh karena banyak tindak pidana ekonomi dilakukan oleh badan itu. Ilmu hukum pidana modern telah mengakui ajaran, bahwa hukum dapat diucapkan terhadap suatu badan hukum.⁸⁷⁾

Menurut Oemar Seno Adji, kemungkinan adanya pembedaan terhadap persekutuan-persekutuan, didasarkan tidak saja atas pertimbangan-pertimbangan utilitis, melainkan atas dasar-dasar yang teoritis dapat dibenarkan.⁸⁸⁾

Berdasarkan beberapa alasan tersebut di atas maka korporasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Contoh dari peraturan yang memungkinkan korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Pasal 15 UU No. 7 Drt. 1955

87) UU No.7 Drt. 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

88) Oemar Seno Adji, (1984), *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Jakarta, Erlangga, hal. 160.

tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Pasal 15 ayat (1) UU No. 7 Drt. tahun 1955:89)

"Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukum pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.

Ayat (2) berbunyi :

Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, atau suatu yayasan, jika tindakan dilakukan oleh orang-orang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu tidak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama-sama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.

89) UU No.7 Drt. 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Ekonomi.

Ayat (3) berbunyi :

Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka. Hakim dapat memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu dibawa ke muka hakim.

Berdasarkan rumusan Pasal 15 UU TPE tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal TPE itu dilakukan oleh korporasi maka pidananya dijatuhkan kepada : Korporasi, yang memberi perintah atau pemimpin perbuatan atau kedua-duanya.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa korporasi di era sekarang dapat dijadikan subyek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana).

D. Kebijakan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dengan Hukum Pidana

Narkotika dalam berbagai bentuk telah ada selama manusia hidup di bumi. Namun demikian dampak pemakaian narkoba telah menjadi persoalan besar selama 20-30 tahun belakangan ini.⁹⁰⁾

⁹⁰⁾ Annie Bleeker, 1999, *Pendidikan dan Konseling Penyalahgunaan Narkoba*, Sydney, Data Base Kliknarkoba Com.

Menurut data UNDCP (United Nations Drug Control Program) lebih dari 200 juta orang diseluruh dunia telah menyalahgunakan Narkotika.⁹¹⁾

Zat-zat narkotika memiliki daya pecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat narkotika itu. Hal tersebut bisa dihindarkan apabila pemakaiannya diatur menurut dosis yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan farmakologis.⁹²⁾

Pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian. Pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibat sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara.

Sifat "menimbulkan ketagihan" telah merangsang orang-orang yang tidak bertanggungjawab menjadikan sebagai lahan subur mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengedarkannya secara luas baik secara nasional maupun trans nasional dengan jaringan yang tersebar

91) Direktur Reserse Pidana Narkoba, 2002, Pedoman Untuk Orang Tua dan Tokoh Masyarakat Tentang Bahaya Narkoba, Jakarta, Data Base Kliknarkoba Com.

92) Sudjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 4.

dalam satu dan bahkan berbagai negara.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan berbagai metode (cara) yang pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

1. Dengan menggunakan sarana non penal.
2. Dengan menggunakan sarana penal.

1. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dengan sarana non penal

Menurut Sudjono Dirjosisworo penanggulangan penyalahgunaan narkotika dengan sarana non penal dapat dilakukan dengan dua metode :

a. Metode Moralistik

b. Metode Abolisionistik.⁹³⁾

a. Cara Moralistik dalam usaha menanggulangi bahaya narkotika adalah cara mencegah penyalahgunaan narkotika melalui usaha membina/memperkuat mental dan moral, agar menjadi kebal terhadap "bujukan" narkotika, yang dapat dilakukan dengan cara-cara :

1) Pembinaan kesadaran mental

a) Kesadaran melaksanakan kewajiban agamanya masing-masing.

⁹³⁾ Sudjono Dirjosisworo, 1976, *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*, Tribisana Karya, Bandung, hal. 166.

- b) Kesadaran berbakti kepada orang tua, dan selalu membicarakan kesulitan kepada orang tua.
- c) Kesadaran menyelamatkan dan tolong menolong kawan dari ancaman narkotika.
- d) Kesadaran aktivitas kemasyarakatan seperti ikut aktif dalam gerakan pramuka, olah raga, gelanggang remaja, dan lain-lain.
- e) Remaja harus mampu menjadikan kehidupan keluarganya menjadi harmonis, ayah, ibu dan anak-anak hidup dalam suasana yang intim saling sayang dan menjaga keselamatan kehidupan keluarganya.

2) *Approach* penerangan :

Penyampaian penerangan dari remaja kepada remaja baik secara individu maupun kelompok mengenai :

- a) Bahayanya penyalahgunaan narkotika terhadap kehidupan remaja untuk masa depannya.
- b) Bahaya penyalahgunaan narkotika terhadap negara dan bangsa.
- c) Dan lain-lain yang dapat menghindarkan diri dari mengkonsumsi narkotika.

Penerangan-penerangan semacam ini penting agar yang belum/tidak tergolong oleh narkotika dan menjauhkan diri dari "bujukan pengedar

narkotika", sedangkan yang telah menjadi korban rela disembuhkan dan setelah sembuh tidak terjerumus lagi, bahkan diharapkan agar bekas korban narkotika dapat pula memberikan penerangan agar teman-temannya tidak terjerumus ikut mengkonsumsi narkotika.

- b. Cara abolisionistik dalam penanggulangan penyalanggunaan narkotika dikalangan remaja adalah cara menanggulangi bahaya narkotika dengan usaha-usaha menghilangkan atau memperkecil sebab-sebab penyalanggunaan narkotika. Misalnya aktif dalam kegiatan olah raga, pramuka, kegiatan keagamaan, studi club, kursus-kursus, karang taruna dan organisasi-organisasi lainnya. Dengan kata lain metode ini dilakukan dengan pengisian waktu luang supaya tidak sempat berfikir dan diisi hal-hal negatif.

Selain metode moralistik dan abolisionistik di atas upaya non penal dalam rangka penyalahgunaan narkotika dapat pula dilakukan dengan :

- Razia-raza lalu lintas, tempat-tempat hiburan
- Memperketat pengawasan terhadap korporasi yang bergerak dibidang farmasi (kemungkinan penyalahgunaan).
- Memperketat pengawasan terhadap petugas-petugas medis dan lembaga ilmu, pedagang obat, rumah sakit

dan lain-lain badan/lembaga yang diberi kewenangan mempergunakan narkotika dari kemungkinan menyalahgunakan.

- Memperketat pengawasan jalur-jalur rawan penyelundupan narkotika.
- Pengawasan terhadap kemungkinan pembudidayaan narkotika seperti banyak di Aceh dan mungkin juga di daerah lain.

2. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dengan sarana penal.

Penyalahgunaan narkotika pada hakekatnya adalah kejahatan sebagaimana kejahatan yang lain perbedaan pokoknya adalah lebih kepada akibat yang terjadi dari kejahatan jenis ini adalah lebih luas dan kompleks, oleh karenanya upaya penanggulangannya harus dilakukan baik dengan cara preventif (pencegahan agar tidak terjadi penyalahgunaan) dan dengan cara kuratif (penyembuhan).

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dengan cara non penal (hukum pidana) adalah termasuk dalam kelompok preventif, membuat efek pencegahan dengan adanya sanksi hukum pidana kuratif, membuat efek flora kepada pelanggar.

Upaya penanggulangan penggunaan narkotika dengan sarana hukum pidana di Indonesia sudah lama dilakukan bahkan.

Semenjak sebelum kemerdekaan (waktu itu namanya masih Hindia Belanda) yaitu dengan dikeluarkannya Stb. 1927 No. 278 Jo No. 536 tanggal 12 Mei 1927 yang lebih dikenal dengan Ordonansi obat bius (*Verdoovende Middelen Ordonantie*).

Pertimbangan dikeluarkannya Ordonansi obat bius (VMO) adalah dalam rangka mempersatukan dalam satu undang-undang ketentuan mengenai candu dan obat bius lainnya yang saat itu tersebar dalam berbagai peraturan demi tercapainya unifikasi hukum.

Jadi ketentuan ordonansi obat bius lebih merupakan kepentingan penjajah saat itu dibanding sebagai upaya penanggulangan penyalanggunaan narkotika.

Ketentuan yang merupakan larangan dari ordonansi obat bius diatur dalam Pasal 2 dan 3 yakni, dilarang :

- a) Menanam tanaman *papaver* dan *Indischen Hennep*
- b) Mengimpor, memiliki, menguasai, mempunyai, per-
sediaan, menyimpan, mengangkut, menyediakan,
mengolah, memakai, mengekspor tanaman yang mem-
biuskan, *papaver* dan *Indischen Hennep* dan daun
Coca. 94)

94) VMO (*Verdoovende Middelen Ordonantie*/Ordonansi obat bius), Stb. 1927 No. 278 Jo 536.

Kemudian Pasal 12 ayat 1 melarang bagi setiap orang memberikan obat bius, mengadakan atau memberi kesempatan menggunakan suatu obat bius kepada orang lain yang tidak berhak mempunyai/memilikinya.

Sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggar ketentuan Ordonansi obat bius pada waktu itu relatif ringan rata mulai dari denda 100 Gulden hingga 1000 Gulden dan hukuman badan yang relatif ringan yakni kurungan mulai 3 bulan sampai 1 tahun dan terberat adalah penjara.

V.M.O (Ordonansi Obat Bius) yang merupakan produk hukum pemerintah kolonial Belanda tetap berlaku pada saat Indonesia sudah merdeka dengan berdasar kepada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang pada intinya segala peraturan yang ada pada saat Indonesia merdeka masih berlaku sebelum diadakan yang baru. Dengan penyesuaian-penyesuaian ketentuan ordonansi obat bius pun tetap berlaku sampai dengan tahun 1976, 29 tahun setelah Indonesia merdeka.

Pada tahun 1976 dengan UU No. 9 tahun 1976 VMO/Ordonansi Obat Bius dicabut/diganti sehingga ketentuan yang mengatur penanggulangan penyalahgunaan narkotika pun otomatis mengalami perubahan.

Pertimbangan digantinya VMO Stb. 1927 No. 278

Jo 536 adalah :

- Perkembangan lalu lintas dan sarana transportasi
- Kemajuan di bidang teknologi pembuatan obat
- Belum diaturnya masalah pemberian pelayanan kesehatan untuk penyembuhan pecandu.
- Diketemukannya jenis narkotika baru/turunannya sehingga aturan VMO belum bisa memadai.⁹⁵⁾

Perbuatan yang dilarang oleh UU No. 9 tahun 1976 adalah :

- 1) Dilarang secara tanpa hak menanam atau memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki menyimpan atau menguasai tanaman Papaver, tanaman Koka atau tanaman Ganja.
- 2) Dilarang secara tanpa hak memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika.
- 3) Dilarang secara tanpa hak memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika.
- 4) Dilarang secara tanpa hak membawa, mengirim mengangkut atau mentransito narkotika.
- 5) Dilarang secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan,

⁹⁵⁾ UU Narkotika No. 9 tahun 1976 bagian Penjelasan.

menjual, membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika.

- 6) Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain.
- 7) Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri.⁹⁶⁾

Dari segi berat ringannya sanksi hukuman, UU No. 9 tahun 1976 relatif lebih berat sanksi pidananya dibanding ketentuan VMO (Ordonansi obat bius). Sanksi hukuman/pidana dalam UU No. 9 tahun 1976 berupa :

- Denda mulai dari Rp. 1.000.000 - Rp. 50.000.000
- Hukuman kurungan
- Pidana mati.

Walaupun UU Narkotika No. 9 tahun 1976 relatif sudah cukup berat dari segi ancaman pidana maksimumnya (sampai pidana mati) tetapi ternyata penyalahgunaan narkotika belum bisa ditanggulangi dengan tuntas bahkan ada kecenderungan semakin meningkat.

Setelah hampir 20 tahun diberlakukan, UU No. 9 1976 dipandang sudah kurang memadai lagi sebagai

⁹⁶⁾ UU Narkotika No. 9 tahun 1976, Ibid.

sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika mengingat semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan narkotika. Akhirnya pada tahun 1997 dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1997.

Pertimbangan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1997 adalah :

- Dalam upaya peningkatan pengawasan dan pengendalian pengedaran narkotika.
- Semakin meningkatnya kejahatan narkotika dari segi *kualitas* (dalam arti dilakukan oleh sindikat secara terorganisasi, tidak lagi berdiri sendiri, modus operandi dan teknologi canggih), dan kuantitas jumlah pelaku dan korban.
- Perlunya memperberat sanksi
- Perlunya perluasan cakupan kriteria pelanggaran yang bisa dijerat dengan UU Narkotika.

Setelah lima tahun UU Narkotika No. 22 tahun 1997 berlaku ternyata kejahatan narkotika masih tetap marak dan ada kecenderungan meningkat. Hal ini kemungkinan karena faktor-faktor sebagai berikut :

- Lemahnya penegakan hukum
- Kurangnya sarana dan prasarana
- Kurangnya penggunaan sarana non penal untuk menekan kejahatan narkotika.
- Lemahnya undang-undang narkotika itu sendiri.

Dalam penelitian ini akan dipusatkan untuk mengkaji kemungkinan kebelumberhasilan penanggulangan kejahatan narkotika dari segi undang-undang narkotika.

Barda Nawawi Arief berkait dengan UU No. 22 tahun 1997 memberikan catatan tentang beberapa kelemahan dari Undang-undang narkotika tersebut yakni :

- Tidak adanya pengaturan mengenai tindak pidana yang berkait dengan "*property*" yang diperoleh dari tindak pidana narkotika.
- Tidak adanya kualifikasi yuridis dari suatu tindak pidana narkotika (pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran).
- Banyaknya pidana denda dimungkinkan adanya keengganan terpidana untuk membayar karena dari segi kalkulasi tidak akan efektif (mungkin terpidana lebih memilih kurungan pengganti denda).
- Adanya pidana minimal tidak disertai sistem pemindaan minimal.
- Ketentuan percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat yang dirasakan janggal.
- Masalah ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 82 ayat 4 tidak ada ketentuan mengenai kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan

telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan sedang yang ada hanya siapa yang dipertanggungjawabkan. Hal ini jelas tidak bisa dioperasionalisasikan.⁹⁷⁾

⁹⁷⁾ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Bandung, hal. 197 - 204.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia

Kata "kebijakan" mengandung arti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar suatu rencana dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain itu kata "kebijakan" juga bermakna kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud yang kesemuanya itu dipakai sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. 98) Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa "kebijakan" merupakan garis haluan atau dasar pedoman untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan.

Selanjutnya kata "pertanggungjawaban" yang berasal dari kata "tanggung jawab" yang mendapat imbuhan per-an mengandung arti perbuatan (hal) bertanggung jawab, memikul, menanggung segala sesuatu. 99)

Kata korporasi "dalam bahasa Belanda "*corporatie*" atau badan hukum adalah sekumpulan manusia yang menurut hukum terikat mempunyai tujuan yang sama, atau berda-

98) P₃B, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Dep. P & K, hal. 115.

99) Ibid, hal. 899.

sarkan sejarah menjadi bersatu, yang memperlihatkan sebagai subyek hukum tersendiri dan oleh hukum dianggap menjadi satu kesatuan. Perkumpulan buruh dan majikan dalam suatu bidang usaha atau bidang pekerjaan tertentu. 100)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "badan hukum" diartikan sebagai :

"Perkumpulan yang di dalam hukum diakui sebagai subyek hukum seperti perseroan, yayasan, lembaga dsb." 101)

Kata "kebijakan" dalam penelitian ini yang dimaksud adalah kebijakan legislatif. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan legislatif adalah :

Suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan. Kebijakan menetapkan pidana dalam perundang-undangan, yang dapat juga disebut tahap kebijakan legislatif, merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap pidana dan tahap pelaksanaan pidana. 102)

100) Fockema Andreau, 1983, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Bina Cipta, hal. 83.

101) Op. Cit. hal. 63

102) Barda Nawawi Arief, Loc. Cit.

Jadi dengan demikian yang akan diteliti dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan narkoba adalah lebih kepada produk-produk hukum yang telah dikeluarkan oleh pembuat Undang-undang dan lebih khusus lagi kepada produk hukum untuk menangani korporasi yang melakukan tindak pidana narkoba.

Usaha penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara yang pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua :

- dengan menggunakan sarana undang-undang/hukum
- dengan cara non hukum

Dalam tulisan ini hanya akan dibahas cara penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan sarana undang-undang atau hukum.

Dalam sejarah hukum yang mengatur narkoba di Indonesia terdapat tiga macam undang-undang yang mengatur mengenai narkoba. Ketiga undang-undang dimaksud adalah :

- a. *Verdoovende Middelen Ordonnantie* Stb. 1927 No. 278 jo No. 536 atau yang kita kenal dengan ordonansi obat bius.
- b. Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.
- c. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Masing-masing undang-undang di atas berbeda dalam pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, walaupun tidak berbeda secara keseluruhan (ada juga

persamaannya). Perbedaan yang paling mencolok terutama antara Ordonansi obat bius dengan Undang-undang No. 9 tahun 1976 dan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 ini dapat dimaklumi karena latar belakang dan tujuan dari dibuatnya undang-undang itu adalah berbeda. Ordonansi obat bius dibuat pada masa penjajahan, kepentingan penjajah lebih mewarnai. UU No. 9 Tahun 1976 dan UU No. 22 Tahun 1997 lebih dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat.

1. Perkembangan Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

a. Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*) stb. 1927 No. 278 jo No. 536.

Verdoovende Middelen Ordonnantie selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan VMO dibuat oleh pemerintah jajahan Belanda (waktu itu) untuk mempersatukan di dalam suatu undang-undang berbagai ketentuan mengenai candu dan obat-obat bius lain yang tersebar di berbagai undang-undang yang terpisah atau di luar ketentuan yang mengatur perbuatan mengisap candu di wilayah Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Selain itu juga untuk adanya unifikasi hukum yang mengatur tentang narkotika.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam VMO diatur dalam Pasal 2 dan 3 :

- Pasal 2 VMO mengatur tentang larangan untuk pemeliharaan atau penanaman *Papaver* dan *Indische*

Hennep (salah satu jenis narkotika) kecuali untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. 103)

- Pasal 3 VMO mengatur tentang larangan untuk mengimpor, memiliki, menguasai, mempunyai persediaan, menyimpan, mengangkut, menyediakan, pengolahan secara pabrik, pengolahan, penjualan, pemakaian, mengekspor obat-obatan yang membiuskan, *papaver* dan *indische hennep* termasuk mengimpor daun *Coca* kecuali untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. 104)

Ketentuan-ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran Ordonansi obat bius atau VMO diatur dalam Pasal 25 untuk tindak pidana yang selesai dan Pasal 26 untuk tindak pidana yang tidak selesai (masih dalam tahap percobaan) dan pembantuan.

Ayat 7 Pasal 27 VMO mengatur

Jika suatu perbuatan yang dapat dihukum dalam Pasal 25 ini dilakukan oleh suatu badan hukum, maka penuntutan ditujukan dan hukuman dijatuhkan kepada pengurus dan komisaris yang tinggal di Indonesia dan bila orang-orangnya berha-

103) *Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Stb. 1927 jo. 536, Pasal 2.

104) *Ibid*, Pasal 3.

langan, kepada perwakilan badan hukum tersebut yang ada di Indonesia. Ketentuan ini juga berlaku dalam segala hal, dimana suatu badan hukum bertindak sebagai pengurus, komisaris, atau perwakilan dari badan hukum lain. 105)

Dari ke 11 ayat Pasal 25 VMO tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh korporasi terdapat dalam ayat 2a; ayat 3a; ayat 4 dan 5.

Ayat 2a Pasal 25 VMO memberikan ancaman pidana denda 1000 Gulden terhadap pelanggaran pemeliharaan dan penanaman *papaver* atau *indische hennep*, selain itu terpidana juga dibebani biaya pemusnahan tanaman tersebut.

Ayat 3a Pasal 25 VMO mengatur tentang impor, ekspor, memiliki, mempunyai, menyimpan, atau dalam persediaan, mengangkut, menggunakan, membuat, mengolah secara pabrik, pengolahan, menjual dan menyerahkan obat-obat bius, *papaver* dan *indische hennep*, juga impor dan ekspor daun Coca, bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini, yang diadakan dengan :

1. Tidak melebihi dari 100 gram candu kasar, olahan atau medis.
2. Obat-obat bius lain daripada yang disebut di bawah 1 sampai jumlahnya tidak melebihi dari 10 gram.
3. *Papaver*, *Indische hennep* dan daun-daun Coca

sampai jumlahnya tidak melebihi dari 10 kilo.¹⁰⁶⁾

Dengan ancaman hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau hukuman denda maksimal 100 Gulden.

Ayat 4a Pasal 25 VMO mengatur apabila jumlah narkotika melebihi ketentuan dari ayat 3a, yakni mengatur hukuman kurungan dinaikkan menjadi 4 bulan atau hukuman denda maksimal 100 Gulden dan dalam hal ini kedua hukuman itu bisa juga dikomulasikan.

Ayat 4b mengatur apabila terjadi *Recidive* (pengulangan) :

Jika waktu melakukan perbuatan itu belum berlaku 2 tahun, sejak hukuman yang sudah-sudah dari terdakwa lantaran perbuatan yang sama menjadi kenyataan, dapat dijatuhkan hukuman maksimal 3 tahun atau hukuman denda maksimal f. 2000,- atau hukuman ini bersama. ¹⁰⁷⁾

Pada ayat 5a ditegaskan tentang tindak pidana sebagaimana disebut dalam ayat 4 sub a yang dilakukan dengan sengaja ancaman hukuman kurungan dinaikkan menjadi 4 bulan dan denda maksimal 60.000 Gulden.

105) Ibid, Pasal 25 ayat 7.

106) Ibid, Pasal 25 ayat 3a.

107) Ibid, Pasal 5.

Ayat 5b menaikkan ancaman pidana :

Jika jumlah dengan mana pelanggaran tersebut dilakukan, melebihi dari 30 kilo candu kasar, olahan atau medis, 3 kilo obat-obat bius lain atau 3.000 kilo *papaver*, *Indischen hennep*, atau daun Coca, hukuman denda dapat dinaikkan dengan maksimal f. 2.000,- untuk tiap kilo candu kasar, olahan atau medis, tiap 100 gram obat bius lain dan tiap 100 kilo *papaver*, *Indischen hennep* atau daun coca, melebihi jumlah tersebut di muka.

Demikian ketentuan tentang tindak pidana yang "mungkin" dapat dilakukan oleh korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 *Verdoovende Middelen Ordonnantie* atau yang kemudian dikenal dengan sebutan *Ordonansi obat bius*.

Selanjutnya Pasal 26 (1) VMO mengatur tentang tindak pidana yang masih dalam taraf "percobaan", (tindak pidana yang niat dan permulaan pelaksanaannya telah ada tetapi tidak selesai bukan karena kehendak pelaku). Ancaman hukuman untuk tindak pidana ini adalah 2/3 dari hukuman pokok.

Ayat 2 Pasal 26 VMO mengatur tentang pembantuan sebelum tindak pidana dilakukan yakni memberi kesempatan, alat-alat atau keterangan untuk melakukan tindak pidana. Ancaman hukuman untuk pembantuan adalah sama dengan ancaman percobaan tindak pidana

yakni 2/3 dari hukuman pokok. 108)

Kebijakan pertanggungjawaban korporasi yang diatur oleh VMO dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

VMO tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud atau dikategorikan sebagai badan hukum. Jadi pengertian badan hukum dalam hal ini dapat ditafsirkan dalam dua kelompok :

Kelompok I Korporasi/Badan Hukum yang disebutkan dalam VMO secara tersirat :

- Pabrik obat
- Pedagang besar obat-obatan
- Apotik
- Rumah sakit .

Diberikan kewenangan untuk mengimpor, memiliki, menguasai, mempunyai dalam persediaan, menyimpan, mengangkut, menyediakan, mengolah, menjual, mengekspor narkotika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh badan hukum kelompok I ini adalah pelanggaran-pelanggaran :

- Menanam dan memelihara *papaver* dan *indische hennep*

108) Ibid, Pasal 26.

- Mengimpor, mengekspor, memiliki, menguasai, mempunyai dalam persediaan, menyimpan, mengangkut, menyediakan, mengolah, menjual obat-obatan yang membiuskan, *papaver* dan *indische hennep*, daun Coca bukan untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan.
- Percobaan tindak pidana.
- Pembantuan.

Kelompok II korporasi/badan Hukum di luar yang disebut oleh VMO atau badan hukum dalam arti luas yang:

- Menanam dan memelihara *papaver* dan *indische hennep*
- Mengimpor, mengekspor, menguasai, memiliki, mempunyai dalam persediaan, menyimpan, mengangkut, menyediakan, mengolah, menjual obat-obatan yang membiuskan, *papaver* dan *indische hennep*, daun Coca.
- Percobaan tindak pidana
- Pembantuan.

Selanjutnya dari ketentuan ayat 7 Pasal 25 VMO apabila dikaitkan dengan 3 model pertanggungjawaban korporasi, maka termasuk model yang kedua, yaitu korporasi sebagai pembuat tindak pidana korporasi tidak dipertanggungjawabkan secara pidana melainkan pengurus yang dianggap bertanggungjawab. Dalam hal

ini VMO memandang korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang terjadi dengan suatu pemikiran bahwa penguruslah yang secara de facto melakukan perbuatan. 109)

VMO tidak memberikan perbedaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi maupun perorangan baik dalam hal jumlah/lamanya pidana maupun jenis pidana. Hal ini dapat dimengerti karena secara riil VMO belum mengakui bahwa korporasi bisa dipertanggungjawabkan secara pidana.

b. Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

Undang-undang obat bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*) Stb. 1927 No. 278 jo 536 yang berlaku hampir empat puluh tahun akhirnya dicabut dengan berlakunya Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Pertimbangan lahirnya UU No. 9 Tahun 1976 sebagai pengganti dari VMO 1927 No. 278 jo 536 menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah :

- a. Sejak tahun 1970-an mulai dirasakan adanya masalah penyalahgunaan narkotika yang dinilai sebagai bahaya atau ancaman yang tidak saja terhadap pribadi-pribadi warga masyarakat, melainkan telah

109) Muladi dan Dwidja Priyatno, Loc. Cit, hal. 67.

mengancam keselamatan bangsa dan negara. Pada saat itu ditemukan korban-korban penyalahgunaan narkotika remaja yang masih duduk di sekolah lanjutan pertama dan lanjutan atas. Kenyataan ini menyebabkan pemerintah melalui Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 dan badan pelaksanaanya menempatkan Narkotika sebagai masalah nasional yang upaya penanggulangannya harus digarap secara serius. Kemudian terbukti pula adanya penanaman, pembuatan, penyimpanan, dan pengedaran yang menyimpang dari ketentuan pengawasan narkotika, sehingga memerlukan kewaspadaan yang tinggi.

- b. Kondisi perundang-undangan Narkotika sebelum UU No. 9/1976 yaitu Undang-undang Obat Bius atau VMO Stb. 1927 No. 278 jo No. 536 tanggal 12 Mei 1927 tidak memadai lagi untuk dapat menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika. Undang-undang yang berlaku sebelum Undang-undang No. 9/1976 tersebut yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1928 memang telah berjasa pada zamannya yaitu bahwa Undang-undang Obat Bius ini telah menarik berlakunya berbagai undang-undang yang terdahulu sebanyak 44 peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obat bius. Namun diukur dari kenyataan tahun 1970-an telah banyak kekurangan. Beberapa kelemahan dan kekurangan Undang-undang

Obat Bius dalam penanggulangan narkotika antara lain adalah :

- 1) Karena kemajuan teknologi, juga dalam industri obat-obatan yang mengandung zat-zat narkotika maka jenis-jenis baik yang dipergunakan maupun yang disalahgunakan telah berubah jauh antara yang diatur Undang-undang obat bius dengan kenyataan yang dihadapi sejak tahun 1970-an, sehingga undang-undang obat bius tidak mampu menangani bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi.
- 2) Wilayah pemerintah Hindia Belanda serta sistem dan struktur pemerintahan telah berubah sehingga apa yang ditentukan pada saat kekuasaan Hindia Belanda sudah tidak sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Aparatur pemerintah seperti departemen, direktorat dan sebagainya pun tidak bisa memadai dengan keadaan saat itu.
- 3) Pengaturan mengenai impor dan ekspor zat yang mengandung narkotika dihubungkan dengan tujuan dan volume keperluan narkotika sudah tidak sesuai lagi.
- 4) Hukum Acara Pidana yang mengatur perkara pidana telah tidak sesuai apalagi setelah dikeluarkannya KUHAP pada tahun 1981.

5) Sanksi dan pelaksanaan pidana tidak seimbang dengan perbuatan penyalahgunaan narkotika.

6) Tidak ada pengaturan yang tegas mengenai pembuatan, penyimpanan, pengedar, dan pemakai yang menyalahgunakan.

c. Faktor-faktor pengaruh dan reaksi lingkungan masyarakat yang mendesak untuk menghadirkan undang-undang baru tentang narkotika. 110)

Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang No. 9 Tahun 1976 meliputi dua hal :

- Bersifat umum : berlaku bagi semua orang, terdapat dalam Pasal 23.
- Bersifat khusus : hanya bagi dokter, terdapat dalam Pasal 24.

Adapun larangan yang berlaku umum adalah:

- 1) Dilarang secara tanpa hak menanam atau memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman *Papaver*, tanaman Koka atau tanaman Ganja;
- 2) Dilarang secara tanpa hak memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika;
- 3) Dilarang secara tanpa hak memiliki, menyimpan

110) Soedjono Dirdjosisworo, 1980, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 117-118.

- untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika;
- 4) Dilarang secara tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika;
 - 5) Dilarang secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika;
 - 6) Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain;
 - 7) Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri. 111)

Larangan yang bersifat khusus adalah, penggunaan dan pemberian narkotika oleh dokter kecuali untuk pengobatan.

Perbuatan yang dilarang baik dalam Pasal 23 maupun Pasal 24 tersebut dalam alinea di atas apabila dilakukan atau dilanggar merupakan tindak pidana.

Dari perbuatan-perbuatan yang dilarang di atas maka yang memungkinkan untuk dilakukan oleh

111) Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Sekretariat Negara, Jakarta, Pasal 23.

korporasi hanyalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 sedang apa yang diatur dalam Pasal 24 sifatnya hanya khusus bagi dokter.

Mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan apabila korporasi melanggar larangan atau melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23, maka ketentuannya adalah :

Jika suatu tindak pidana mengenai narkotika dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana narkotika itu atau yang bertindak sebagai pemimpin atau penanggung jawab dalam pembuatan atau kelalaian itu; ataupun terhadap kedua-duanya. 112)

Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika diatur dalam bab VIII mulai Pasal 36 - 53, dengan perincian :

- sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 23 diatur dalam Pasal 36.

112) Ibid, Pasal 49.

- sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika (Pasal 23) yang tidak selesai diatur dalam Pasal 37.
- sanksi pengulangan tindak pidana diatur dalam Pasal 39.
- lain-lain (tidak disebutkan semuanya karena tidak ada hubungan dengan penelitian ini).

Sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 23 ayat 1-7 diatur dalam Pasal 36 dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (1) :

- a. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut tanaman Koka atau tanaman Ganja.
- b. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut tanaman *Papaver*.

2) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (2) :

- a. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut

menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja.

- b. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.

3) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (3) :

- a. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja.
- b. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.

4) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (4) :

- a. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja.
- b. Dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama-

lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.

5) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (5) :

- a. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja.
- b. Dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.

6) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (6) :

- a. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja.
- b. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (Sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 15.000.000,- (lima belas juta

rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.

7) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (7) :

a. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja.

b. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya. 113)

Ketentuan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 di atas adalah bagi tindak pidana narkotika yang selesai, sedang yang masih dalam taraf percobaan diatur dalam Pasal 37, dengan ketentuan bahwa ancaman pidana bagi percobaan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1-7 sama dengan tindak pidana narkotika yang selesai.

Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) sampai dengan 7 dapat ditambah dengan sepertiga, jika terpidana ketika melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak menjalani pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Pasal 39 UU No. 9 Tahun 1976.

113) Ibid, Pasal 36.

Dari uraian di atas terlihat bahwa Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tidak memberikan definisi ataupun kualifikasi mengenai apa yang dimaksud dengan badan hukum atau korporasi sebagaimana halnya dengan Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*).

Pengertian korporasi dapat ditafsirkan sebagai berikut :

Kelompok I, korporasi yang disebutkan dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1976 yang berhak secara hukum :

Pasal 4

(1) Untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan kepada lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga tempat pendidikan dapat diberi izin oleh Menteri Kesehatan untuk membeli, menanam, menyimpan untuk memiliki atau persediaan, ataupun menguasai tanaman *Papaver*, Koka dan Ganja.

(2) Lembaga yang menanam *Papaver*, Koka dan Ganja wajib membuat laporan tentang luas tanaman, hasil tanaman dan sebagainya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

(1) a. Menteri Kesehatan memberikan izin kepada apotek untuk membeli, meracik, menyedia-

kan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai, menjual, menyalurkan, menyerahkan, mengirimkan dan membawa atau mengangkut narkotika untuk kepentingan pengobatan;

b. Menteri Kesehatan memberikan izin kepada dokter untuk membeli, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai, menyalurkan, menyerahkan atau mengirimkan, membawa atau mengangkut, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan pengobatan.

(2) a. Menteri Kesehatan memberikan izin khusus kepada pabrik farmasi tertentu untuk membeli, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai, memproduksi, mengolah, meracik, menjual, menyalurkan, menyerahkan, mengirim dan membawa atau mengangkut narkotika untuk kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan.

b. Menteri Kesehatan memberikan izin khusus kepada pedagang besar farmasi tertentu untuk membeli, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai, menjual, menyalurkan, menyerahkan, mengirim dan membawa atau mengangkut narkotika

untuk kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan.

- c. Menteri Kesehatan memberikan izin khusus kepada rumah sakit untuk membeli, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai, menyerahkan, mengirimkan, membawa atau mengangkut dan menggunakan narkotika untuk kepentingan pengobatan.
- d. Menteri Kesehatan memberikan izin khusus kepada lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan untuk membeli dari pedagang besar farmasi, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai dan menggunakan narkotika untuk tujuan ilmu pengetahuan. 114)

Dari Pasal 4 dan 5 di atas dapat disimpulkan bahwa korporasi yang berhak secara hukum adalah :

- Lembaga Ilmu Pengetahuan atau Pendidikan
- Apotik
- Pabrik farmasi
- Pedagang besar farmasi
- Rumah sakit.

setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan.

114) Ibid, Pasal 4 dan 5.

Kelompok II korporasi atau badan hukum umum (tidak hanya yang disebutkan dalam kelompok I) yang tidak mendapatkan/mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan melakukan perbuatan sebagaimana dilarang dalam Pasal 23 ayat 1-6 Undang-undang No. 9 Tahun 1976.

Ketentuan Pasal 49 Undang-undang No. 9 Tahun 1976 apabila dikaitkan dengan tiga model pertanggungjawaban korporasi dapat dikelompokkan dalam gabungan antara model ke dua dan ke tiga yaitu :

- model ke dua, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab.
- model ke tiga, korporasi sebagai pembuat dan penanggungjawab. 115)

Penggunaan dua model pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut di atas menunjukkan bahwa dengan dipidanya pengurus korporasi saja tidaklah cukup dibandingkan dengan kerugian yang diakibatkan ataupun keuntungan yang diperoleh korporasi. Dengan kata lain hanya dengan memidana pengurus belum merupakan *prevensi special* kepada korporasi untuk tidak

115) Muladi dan Dwidja Priyatno, Loc.Cit., hal. 67 dan 68.

mengulangi perbuatannya.

Ketentuan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam Undang-undang No. 9 tahun 1976 mengandung kelemahan-kelemahan :

- Tidak adanya penjelasan dalam UU No. 9 tahun 1976 mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi/badan hukum. Padahal KUHP sebagai Undang-undang payung tidak mengenal pertanggungjawaban korporasi.
- Tidak adanya jenis sanksi pidana serta jenis tindakan tata tertib yang bisa dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana karena UU No. 9 tahun 1976 tidak mengaturnya.
- Tidak adanya pemberatan hukuman bagi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh korporasi mengindikasikan bahwa UU No. 9 tahun 1976 memandang kualitas kejahatan narkoba yang dilakukan oleh korporasi dianggap sama dengan pelaku perorangan.

Dari berbagai kelemahan di atas jelas bahwa ketentuan pasal yang tidak bisa dioperasionalisasi.

c. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Setelah berlaku sekitar 21 tahun Undang-undang No. 9 tahun 1976 diganti dengan UU No. 22 tahun

1997. Banyak perubahan dilakukan dengan maksud agar undang-undang narkotika yang baru lebih dapat memenuhi kebutuhan hukum di bidang narkotika. 116)

Salah satu perubahan yang dilakukan adalah ketentuan tentang perbuatan yang dilarang dan ketentuan tentang pemidanaan yang dijadikan satu dalam UU No. 22 tahun 1997.

Berkait dengan ketentuan yang mengatur korporasi yang melakukan tindak pidana dalam UU No. 22 tahun 1997 diatur sebagai berikut :

- Ketentuan pidana pokok bagi korporasi yang melakukan tindak pidana selesai diatur dalam Pasal 78 ayat 1 dan ayat 4, Pasal 79 ayat 1 dan ayat 4, Pasal 80 ayat 1 dan ayat 4, Pasal 81 ayat 1 dan ayat 4, Pasal 82 ayat 1 dan ayat 4.
- Ketentuan pidana pokok bagi korporasi yang melakukan tindak pidana yang belum selesai (percobaan) diatur dalam Pasal 83.
- Ketentuan mengenai pidana tambahan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika, diatur dalam Pasal 91. 117)

Pasal 78 ayat 1 UU No. 22 tahun 1997¹¹⁶⁾ menentu-

116) Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Sekretariat Negara, Jakarta, Pasal 78.

117) Ibid, Pasal 79.

kan barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a) menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
atau

b) memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Kemudian ayat 4 mengatur tentang apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh korporasi maka ancaman hukumannya adalah pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 79 ayat 1, barang siapa tanpa hak dan melawan hukum

a. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.

000,- (seratus juta rupiah).

Ayat 4 Pasal 79, apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh korporasi maka ancaman hukumannya adalah :

- pidana denda maksimal Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a.
- pidana denda maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf b.

Pasal 80 ayat 1, barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,-
- b. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,-
- c. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ayat 4 mengatur tentang apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). 118)

Pasal 81 mengatur tentang barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. membawa mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. membawa mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. membawa mengirim, mengangkut, atau mentransito

118) Ibid, Pasal 80.

narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ayat 4, apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). 119)

Pasal 82, barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu

119) Ibid, Pasal 81.

milyar rupiah);

- b. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Ayat 4, apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga

milyar rupiah). 120)

Ketentuan pidana pokok bagi korporasi yang melakukan tindak pidana yang belum selesai atau dalam taraf percobaan diatur dalam Pasal 83. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 78, 79, 80, 81 dan Pasal 82, diancam dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut. 121)

Penjatuhan pidana terhadap segala tindak pidana narkoba dalam undang-undang ini kecuali dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda tidak lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat pula dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subyek hukum tindak pidana narkoba yang berupa pimpinan korporasi :

Pasal 99

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bagi :

a. pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan

120) Ibid, Pasal 82.

121) Ibid, Pasal 83.

- sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, apotek, dan dokter yang mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. 122)

Dari rumusan di atas maka dalam hal terdapat tindak pidana yang melibatkan atau dilakukan korporasi maka ada dua kelompok yang dapat dimintai pertanggungjawaban :

1. Pimpinan korporasi berdasar Pasal 99 UU No. 22 Tahun 1997;
2. Korporasi berdasar Pasal 78 - 82 ayat 4 dan Pasal

122) Ibid, Pasal 99.

83 untuk tindak pidana yang belum selesai (masih dalam taraf percobaan atau pemufakatan jahat).

2. Kelemahan kebijakan pertanggungjawaban korporasi berdasarkan UU No. 22 Tahun 1997.

Sebagaimana diuraikan di atas dalam hal terjadi tindak pidana narkoba oleh korporasi maka ada dua pihak yang dapat dipertanggungjawabkan :

1. Pimpinan korporasi (Pasal 99)
 2. Korporasi yang bersangkutan (Pasal 78 - Pasal 83)
- a. Kelemahan Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi berdasarkan Pasal 99

Dalam hal terjadi tindak pidana narkoba yang melibatkan korporasi maka pimpinan korporasi yang bertanggungjawab. Kalau dicermati redaksi Pasal 99 UU No. 9 Tahun 1997 maka akan menimbulkan dua macam kemungkinan/menimbulkan dualisme pemahaman :

- 1) Yang dimaksud oleh redaksi Pasal 99 adalah pertanggungjawaban pimpinan korporasi yang melakukan tindak pidana secara materiil dan pribadi, sesuai dengan bunyi Pasal 99 :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bagi :

Pimpinan yang mengedarkan
bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Dst.

Dari redaksi di atas tercermin pengertian bahwa seolah-olah perbuatan pribadi dari pimpinan korporasi.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bahwa :

- perbuatan pimpinan korporasi secara pribadi seharusnya sudah terkafer dalam rumusan Pasal 78 - 82
- seandainya Pasal 99 dimaksud sebagai subyek hukum yang bersifat khusus maka semestinya sanksi harus lebih berat dibanding dengan sanksi bagi pelaku yang tidak memiliki kualifikasi pemberat pidana. Lihat abortus yang dilakukan oleh perorangan dengan dilakukan oleh petugas medis ancaman hukuman lebih berat + 1/3 (Pasal 346 - 349).

2) Pasal 99 lebih tepat sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan korporasi apabila terjadi tindak pidana dari korporasi yang dipimpinnya.

Apabila disepakati asumsi yang ke dua bahwa rumusan Pasal 99 adalah bagian dari pertanggungjawaban korporasi maka ditemukan kejanggalan/kelemahan sebagai berikut :

- 1) Kelemahan dalam sanksi yang diancam yang relatif lebih ringan dibanding dengan tindak pidana perorangan.
- 2) Tidak adanya ketentuan untuk percobaan tindak

pidana/pemufakatan jahat karena ketentuan Pasal 83 jelas hanya menunjuk percobaan dan pemufakatan jahat untuk Pasal 78 - 82 berarti tidak berlaku untuk Pasal 99.

- 3) Kalau korporasi tidak terbukti melakukan tindak pidana narkoba maka pimpinan korporasi pun tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana.
- 4) Merupakan suatu ketidakadilan apabila perbuatan itu merupakan perbuatan bawahannya yang mengatas namakan korporasi sedang pimpinan tidak bersalah (mendelegasikan urusan dan tanggung jawab).
- 5) Bertentangan dengan asas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan.

Pasal 6 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa :

"Tidak seorang jua pun dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya." 123)

Ketentuan di atas mengandung pemahaman persyaratan untuk menjatuhkan pidana diperlukan :

123) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Negara, Jakarta, Pasal 6.

- orang yang dianggap bertanggungjawab
- adanya kesalahan
- alat bukti yang sah
- keyakinan hakim.

Pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang dianggap dapat bertanggungjawab mengandung dua pemahaman :

- korporasi tidak dapat dijatuhi pidana karena korporasi bukanlah orang
- hanya orang yang dianggap dapat bertanggungjawab yang dijatuhkan pidana. Jadi hanya orang yang mampu mengerti dan memahami perbuatan beserta akibat. Ini berarti orang yang tidak sempurna akal (orang gila, mabuk berat, tidak sadar) tidak masuk dalam pasal ini. Pasal 44 KUHP menentukan bahwa barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurnanya akal atau sakit berubah akal tidak boleh dihukum. 124)

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP meliputi :

- keterangan saksi
- keterangan ahli
- surat

124) Moeljatno, KUHP, Pasal 44.

- petunjuk
- keterangan terdakwa 125)

Walaupun persyaratan-persyaratan di atas sudah dipenuhi dalam penjatuhan pidana diperlukan keyakinan hakim tentang :

- perbuatan terdakwa
- keabsahan alat-alat bukti
- kepastian kebenaran pelaku. (Pasal 183 KUHP).

b. Kelenahan Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi
Dalam Undang-undang Narkotika berdasar Pasal 78
sampai Pasal 83

a. Terlalu luasnya rumusan

Rumusan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkotika dalam Pasal 78 - 82 UU No. 22 Tahun 1997 semuanya dimulai dengan kata :

" tanpa hak dan melawan hukum "

ini berarti bahwa bukan merupakan tindak pidana apabila perbuatan itu dilakukan oleh yang berhak dan dilakukan berdasar atas aturan yang ditetapkan.

Kata "hak" adalah merupakan kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena ditentukan oleh undang-

125) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Mayasari Bhakti, Ska, Pasal 84.

undang atau aturan. "Hak" dapat juga berarti kewenangan atau kekuasaan yang benar sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. 126)

Melawan hukum dapat dimaknai menentang, menyalahi atau melanggar peraturan atau undang-undang atau ketentuan yang berlaku. Dalam konteks yang lebih luas dapat pula diartikan melanggar undang-undang baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. 127)

Ada dua kategori korporasi yang dapat dikatakan melakukan tindak pidana narkotika :

Kategori I : Korporasi yang tanpa hak melakukan perbuatan :

- a. menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.
- b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.
- c. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan II.

126) Dep. P & K, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hal. 292.

- d. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan III.
- e. memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan I.
- f. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan II.
- g. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan III.
- h. membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I.
- i. membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan II.
- j. membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan III.
- k. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkotika golongan I.
- l. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar narkotika golongan II.

m. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkotika golongan III.

Kategori II : korporasi yang mempunyai hak (diberi izin oleh pemerintah melalui instansi yang berwenang) tetapi menyalahgunakan hak atau menyalahgunakan izin yang diberikan. Adapun contoh perbuatannya adalah :

- Sebuah pabrik farmasi diberi izin oleh Menteri Kesehatan untuk memproduksi dan mengolah narkotika golongan II tetapi dia juga memproduksi dan mengolah narkotika golongan I.
- Pedagang farmasi yang berbadan hukum diberi izin Menteri Kesehatan untuk mengimpor narkotika dengan ketentuan tetapi dia melanggar ketentuan yang ditetapkan.
- dan sebagainya. Prinsipnya walaupun korporasi ini diberi izin oleh pemerintah tetapi dalam pelaksanaannya melanggar izin yang telah diberikan. Korporasi kategori ke dua ini melakukan salah satu atau lebih bentuk perbuatan sebagaimana disebutkan di atas (huruf a - m

dalam kategori I) padahal ijin yang diberikan bukan sebagaimana yang senyatanya dilakukan oleh korporasi yang bersangkutan.

Perbuatan korporasi dilakukan bertentangan dengan ijin yang diberikan baik berupa melampaui batas ketentuan dalam hal kualitas maupun kuantitas narkotika yang diijinkan maupun dalam hal bidang usaha yang diperkenankan/diijinkan.

Korporasi kategori I dapat berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas, *Comanditer Venotschescap*, N.V., Koperasi dan bentuk lain sebagaimana disebutkan secara luas dalam Pasal I ayat 19 UU No. 22 Tahun 1997.

"Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan." 128)

Rumusan di atas menunjukkan betapa luasnya cakupan perihal apa yang dimaksud dengan korporasi cukup apabila ada kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan yang melakukan tindak pidana narkotika dapat dijerat dengan UU No. 22 Tahun 1997.

Kata "terorganisasi" menurut Kamus Besar

128) Undang-undang No. 22 Tahun 1997, Op.Cit., Pasal 19.

Bahasa Indonesia berarti kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian di dalam perkumpulan untuk tujuan tertentu, atau dapat juga berarti kelompok kerjasama yang diadakan untuk tujuan bersama.

Kekayaan berarti perihal yang bersifat/ber-ciri kaya, harta/benda milik orang; kekuasaan. 129)

Dari pemahaman di atas menunjukkan adanya perluasan makna dari istilah korporasi itu menjadi demikian luas karena tidak diperlukan lagi persyaratan korporasi harus berbadan hukum.

Pengertian yang demikian luas dari korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 19 di atas yang tujuan semula untuk lebih dapat meng-efektifkan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dalam kenyataannya akan menimbulkan berbagai penafsiran yang sangat beragam sehingga akan menjadi pasal karet yang bergerak mengendur dan meluas tergantung yang mendefinisikannya.

Korporasi kategori ke II dapat berwujud :

1. Eksportir narkotika
2. Importir narkotika
3. Pedagang besar farmasi

129) Dep. P & K, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hal. 630.

4. Pabrik obat
5. Rumah sakit
6. Balai pengobatan
7. Lembaga ilmu pengetahuan
8. Apotik/toko obat

No. 1 - 8 di atas merupakan korporasi selama memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Pasal 1 ayat 19 UU No. 22 Tahun 1997.

b. Sanksi Pidana Denda Bagi Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Mengandung Banyak Kekurangan

Sanksi pidana denda bagi korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika mempunyai beberapa kekurangan :

- Kemungkinan tidak efektif ditinjau dari sudut tujuan pemidanaan.
- Pidana denda mengandung kelemahan-kelemahan.

Menurut Ensiklopedi Indonesia kata efektivitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuannya. Adapun arti kata efektif berasal dari bahasa Inggris yakni "*effective*" yaitu baik hasilnya, mempan, tepat, benar. Sedangkan arti kata efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, berarti : ada efeknya

(akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil atau berhasil guna).¹³⁰⁾

Jadi efektivitas pembedanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pembedanaan. Suatu pembedanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pembedanaan itu tercapai.

Berbicara masalah tujuan pembedanaan/tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pembedanaan maka tidak ada pegangan yang kita pakai sebagai pijakan dari KUHP yang sekarang berlaku, karena baik dalam buku satu buku dua maupun buku ke tiga tidak ada satu pasalpun yang mengatur tujuan pembedanaan.

Menurut Roeslan Saleh terdapat dua poros yang menentukan berjalannya hukum pidana yaitu :

- a. Segi prevensi, hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi pembalasan, bahwa hukum pidana merupakan penentuan hukum, koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat kontra terhadap

¹³⁰⁾ Dep. P & K, Op.Cit., hal. 190.

hukum.¹³¹⁾

Sahetapy menyatakan kalau pidana itu harus dapat membebaskan si pelaku dari jalan keliru yang telah ditempuhnya. Dalam pidana tersimpul penderitaan dalam pengertian membebaskan. Penderitaan dalam pidana tidak dimaksudkan agar pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan denda melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan. ¹³²⁾

Menurut teori restribusi Pembalasan merupakan tujuan utama, pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tidak ditujukan untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Menurut teori utilitarian tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi). Pidana ditetapkan berdasar tujuan sebagai alat pencegahan kejahatan, sebagai sarana untuk mencapai goal (tujuan akhir) yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam teori utilitarian pidana harus bersifat prospek-

¹³¹⁾ Roeslan Saleh, 1983, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

¹³²⁾ JE. Sahetapy, 1994, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, hal. 43.

tif (melihat ke depan), pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi orientasinya tetap dalam upaya untuk membantu pencegahan kejahatan agar tercapai kesejahteraan masyarakat. 133)

Perkembangan pemikiran mengenai tujuan pemidanaan yang sekarang terjadi dapat disimak dari rumusan konsep KUHP 1999/2000. Tujuan pemidanaan menurut konsep KUHP 1999/2000 adalah :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 134)

Dalam tujuan pemidanaan konsep KUHP tersimpul pandangan perlindungan masyarakat dari kejahatan. Tujuan kedua mengandung maksud bukan saja untuk merehabilitasi, tetapi juga meresosialisasi

133) Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 17.

134) Konsep KUHP 1999/2000, Pasal 50.

terpidana dan mengintegrasikan yang bersangkutan ke dalam masyarakat. Tujuan ketiga sejalan dengan pandangan hukum adat, dalam arti reaksi adat itu dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan (magis) yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum adat. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun pada dasarnya tidak dapat dihindari suatu pandangan dikehendakinya pembalasan terhadap mereka yang telah melakukan tindak pidana oleh masyarakat atau korban. Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu dengan terjadinya tindak pidana adalah salah satu tujuan pembedaan yang tidak dapat diabaikan, karena apabila hal ini terabaikan maka masyarakat akan melakukan tindakan sendiri yang dianggap akan memberi keseimbangan dalam masyarakat tersebut.

Dikaitkan dengan tujuan pembedaan seperti di atas maka pidana denda juga seharusnya dapat dirasakan sifat penderitannya bagi mereka yang dijatuhinya. Secara konkret apakah realisasi dari pidana denda secara obyektif dan subyektif dirasakan oleh pelaku sebagai suatu yang sesuai dengan tujuan pembedaan itu.

Pidana denda menjadi kurang efektif apabila dibandingkan dengan pidana penjara, apabila ditinjau dari segi penjeraannya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Di samping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang darimana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut.

Konsep KUHP 1999/2000 Pasal 76 telah merumuskan alternatif pengganti dari pidana denda yang tidak dapat dibayar, sebagai alternatif pidana denda adalah pidana pengawasan atau pelayanan masyarakat (*social service*). Pembayaran denda lebih dipertegas kemungkinan eksekusinya.

Untuk memaksa atau menimbulkan tekanan agar orang yang dijatuhi pidana denda mau membayar denda, maka dapat ditempuh jalan sebagai berikut:

1. Mengaktifkan fungsi Kejaksaan sebagai eksekutor, yang juga merupakan pengacara negara untuk melakukan gugatan perdata terhadap orang yang tidak mau membayar denda. Dalam kedudukannya sebagai penggugat dapat meminta dilakukannya "*conservatoir beslag*" terhadap barang-barang milik terdakwa (sebagai tergugat tidak terbatas terhadap barang-barang yang terkait

langsung dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan akan tetapi juga terhadap barang-barang lainnya milik terpidana.

2. Melaksanakan secara konsekuen pidana pengganti denda, yang dalam KUHP sekarang berupa pidana kurungan, atau dalam konsep KUHP berupa pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.

Hal tersebut merupakan tekanan psikologis bagi terpidana denda untuk mau membayarnya.

Pidana pengganti denda barulah diterapkan, apabila terpidana sama sekali tidak mempunyai barang apapun untuk dilelang. Yaitu berupa pidana pengawasan atau kerja sosial.

Walaupun demikian masih perlu dikaji apakah pidana pengawasan atau pidana kerja sosial sebagai pidana pengganti denda adalah efektif sebagai pengganti pidana denda.

Pengalaman selama ini yang dikeluhkan oleh eksekutor (Jaksa) tentang sulitnya penagihan denda kepada terpidana, perlu dipikirkan pada putusan hakim yang berupa putusan *verstek* denda (putusan di luar hadirnya terdakwa), hendaknya jangan berbentuk pidana denda lagi akan tetapi berbentuk pidana kurungan. 135)

135) Ninik Suparni, 1993, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 62-63.

Uraian di atas memberi perbandingan terhadap usaha penanggulangan kesulitan dalam hal eksekusi pidana denda. Dalam hal ini disadari bahwa kemungkinan tersebut dapat saja terjadi, oleh sebab itu maka pidana pengganti denda tetap merupakan sarana pengumpul dana, sehingga permasalahannya bukan kuantitas pidana yang dijatuhkan. Akan tetapi sejauh mana tujuan pemidanaan dapat tercapai dengan adanya penjatuhan pidana denda.

Sejauh ini inflasi merupakan faktor yang menjadi penghambat sehingga nilai ancaman pidana denda yang diatur di dalam perundang-undangan pidana tidak mempunyai arti lagi. Sedangkan untuk melakukan perubahan dengan mengalihkan jumlah ancaman denda seperti yang pernah dilakukan terhadap KUHP akan mengalami kesulitan. Hal tersebut adalah disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan yang tidak konsisten antara aturan pidana yang satu dengan aturan pidana yang lainnya.

Dengan menggunakan sistem atau pola kategori merupakan suatu jalan yang paling memadai dalam memberlakukan aturan terhadap ancaman pidana denda. Karena apabila suatu ketika ada perubahan nilai mata uang, maka perubahan yang akan dilakukan hanyalah terhadap aturan umum yang

ada (dalam Buku I KUHP), tanpa harus melakukan perubahan keseluruhan pasal-pasal yang mengancam dengan pidana denda.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pidana denda adalah divergensi antara pidana denda yang diancam dengan pidana denda yang dijatuhkan. Rendahnya penjatuhan pidana denda akan mengakibatkan melemahnya pematuhan hukum.

Meskipun disadari bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana, khususnya pidana denda selalu akan memperhatikan kemampuan terdakwa. Bahkan tidak jarang dalam kasus-kasus tertentu dimana Hakim tidak bisa tidak harus menjatuhkan putusan berupa pidana denda sedangkan terpidana sama sekali tidak mampu untuk membayarnya.

Pidana denda sebagai alternatif daripada pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para Hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia.

Faktor yang menyebabkan jarang dijatuhkannya pidana denda oleh para Hakim dalam dunia peradilan di Indonesia adalah karena jumlah ancaman pidana denda yang terdapat dalam KUHP sekarang pada umumnya relatif ringan.

Untuk kejahatan, maksimumnya berkisar antara Rp 900,- sampai dengan Rp 150.000,-. Maksimum ancaman pidana denda sebesar Rp 150.000,- untuk kejahatan itu pun hanya terdapat dalam dua pasal saja, yaitu dalam Pasal 251 KUHP dan Pasal 403 KUHP.

Untuk pelanggaran, denda maksimum berkisar antara Rp 225,- sampai dengan Rp 75.000,-. Namun yang terbanyak hanya terdapat untuk dua jenis pelanggaran saja yaitu yang terdapat dalam Pasal 568 dan Pasal 569 KUHP.

Sementara itu dalam perkembangan di luar KUHP, terdapat kecenderungan untuk meningkatkan jumlah ancaman pidana denda, salah satunya adalah UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Ancaman pidana denda bagi korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika hingga mencapai tujuh milyar rupiah.

Namun demikian di sisi lainnya kebijakan-kebijakan meningkatkan jumlah pidana denda tersebut tidaklah dibarengi dengan kebijakan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pidana denda, dimana untuk pelaksanaannya adalah tetap terikat pada ketentuan umum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. 136)

136) Ibid, hal. 65.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 KUHP, tidak ada ketentuan batas waktu yang pasti kapan denda itu harus dibayar. Disamping itu tidak ada pula ketentuan mengenai tindakan-tindakan lain yang dapat menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya, misalnya dengan jalan merampas atau menyita harta benda atau kekayaan terpidana.

Menurut sistem KUHP, alternatif yang dimungkinkan dalam hal terpidana tidak mau membayar denda tersebut, hanyalah dengan mengenakan kurungan pengganti. Padahal kurungan pengganti yang dimaksudkan dalam Pasal 30 KUHP hanya berkisar antara 6 (enam) bulan atau dapat menjadi paling lama 8 (delapan) bulan.

Dengan demikian maka betapun tinggi pidana denda yang dijatuhkan Hakim, akan tetapi apabila terpidana tidak mau membayar, konsekuensinya hanyalah dikenakan pidana kurungan yang maksimumnya hanya 6 (enam) atau 8 (delapan) bulan seperti telah disebut di atas.

Dalam hal yang bersangkutan melakukan tindak pidana yang dapat menghasilkan keuntungan materiil yang jumlahnya sampai berjuta-juta rupiah atau bahkan bermilyar-milyar rupiah (misalnya dalam perampokan Bank, korupsi, tindak

pidana ekonomi, penyelundupan, atau perdagangan narkoba dan sebagainya), maka ini berarti yang bersangkutan tetap dapat menikmati hasil kejahatannya dengan tidak perlu khawatir harta benda atau kekayaannya (khususnya yang merupakan hasil kejahatan yang telah dilakukannya) akan dirampas atau disita.

Memang dalam hal ini Hakim dapat pula menjatuhkan tambahan berupa pidana perampasan barang-barang tertentu, namun pidana tambahan ini menurut sistem KUHP hanya bersifat fakultatif saja dan hanya dalam hal-hal tertentu saja yang bersifat imperatif. Lagi pula yang dapat dirampas hanyalah barang-barang yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh korporasi hanyalah diancam dengan pidana denda oleh Undang-undang No. 22 Tahun 1997 padahal alternatif dari tidak dapat dibayarnya denda menurut Pasal 30 KUHP adalah pidana kurungan pengganti denda. Korporasi tidak mungkin dijatuhi pidana kurungan pengganti denda, sehingga bila denda tidak terbayar maka terbebas dari hukuman.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa dengan belum adanya perubahan kebijakan legislatif

mengenai pelaksanaan pidana denda seperti yang terdapat dalam aturan umum KUHP, maka tidak akan banyak artinya kebijakan untuk menaikkan jumlah ancaman pidana denda di luar KUHP.

Di samping kedudukan pidana denda yang demikian itu di dalam sistem KUHP yang sekarang berlaku, terdapat kelemahan pidana denda yang secara *inherent* terkandung di dalam pidana denda itu sendiri.

Adapun kelemahan-kelemahan tersebut adalah :

1. Pidana denda ini dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang, teman/kenalan baik, dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri. Hal mana membawa akibat tidak tercapainya sifat dan tujuan pembedaan untuk membina si pembuat tindak pidana agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, serta mendidik si pembuat tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Si pembuat tindak pidana akan berulang kali berbuat tindak pidana lagi (karena misalnya memiliki bakat atau tingkah laku sebagai pembuat tindak pidana), sebab ia merasa bahwa pertanggungjawabannya akan dipikul oleh orang lain. Kalau pem-

bayaran denda. tidak dapat dipenuhi karena tidak mempunyai uang untuk membayar denda atau tidak ada barang yang dapat dilelang, bukankah tindak pidana lain yang baru lagi akan lahir untuk mendapatkan uang pembayaran denda. Ini berarti tindak pidana yang satu melahirkan tindak pidana yang baru, dan keadaan ini dapat berlanjut seterusnya.

2. Pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut, misalnya uang yang dialokasikan bagi pembayaran denda yang dijatuhkan pada kepala rumah tangga yang melakukan kesalahan mengemudi karena mabuk, akan menciutkan anggaran rumah tangga yang bersangkutan.
3. Pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan.
4. Kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh Jaksa selaku eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara. Di satu pihak dapat di-

adakan upaya paksa dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar terpidana membayar denda dengan memberikan wewenang kepada Jaksa selaku eksekutor untuk melelang barang yang disita, dan kalau barang yang disita tidak ada baru diterapkan pidana pengganti denda.

dengan melihat kondisi di Indonesia dimana masyarakat atau rakyatnya mayoritas masih hidup di dalam taraf di bawah sejahtera materiil atau berkemampuan finansial, mungkinkah dapat memenuhi denda yang harus dibayar. 137)

c. Sanksi Pidana Denda Merupakan Sanksi Tunggal yang Mengandung Kelemahan dalam Pelaksanaan

Sanksi tunggal tidak memberi pilihan kepada Hakim dalam memilih jenis sanksi, atau dengan kata lain apapun alasannya denda tersebut. Padahal sebagaimana diuraikan di atas pidana denda mengandung banyak kelemahan salah satunya adalah bagaimana kalau korporasi yang dijatuhi pidana benar-benar tidak mampu untuk membayar karena pertimbangan kondisi korporasi yang bersangkutan.

Bagi terpidana denda yang tidak mampu membayar maka alternatif yang ditawarkan oleh UU narkotika Pasal 100 adalah :

137) Niniek Suparni, Ibid, hal. 67-68.

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 138) (dalam hal ini tentunya KUHP).

Ketentuan pasal di atas tidak mungkin dapat diterapkan terhadap korporasi karena yang mungkin menjalani pidana kurungan hanyalah orang sedang badan hukum tidak mungkin.

Melihat kelemahan yang sangat fatal di atas maka Hakim akan berfikir berkali-kali untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman pidana denda bagi korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika karena besar kemungkinan korporasi akan memanfaatkan celah hukum di atas, dengan cara tidak membayar denda sehingga eksekusi tidak mungkin dilakukan.

d. Sistem Maksimum (*Indefinite*) Dalam Menentukan Jumlah Denda

Ketentuan pidana khususnya pidana denda bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam bab XII UU No. 22 Tahun 1997 selalu dirumuskan dengan

138) Undang-undang No. 22 Tahun 1997, Op.Cit, Pasal 100.

".... denda paling banyak"

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pembuat undang-undang memakai sistem maksimum (*indefinite*) dalam penentuan sanksi pidana khususnya pidana denda.

Sistem *indefinite* memberi keleluasaan yang besar kepada hakim dalam menentukan jumlah rupiah dari pidana yang dijatuhkan kepada terpidana, hal ini akan menimbulkan disparitas antara hakim yang satu dengan yang lainnya oleh karena tidak ada pedoman penjatuhan pidana denda.

- e. Rumusan Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Undang-undang No. 22 Tahun 1997 Tidak Memperhatikan Korban

Kalau diperhatikan ketentuan pertanggungjawaban korporasi dalam UU No. 22 Tahun 1997 tidak ada satu pasalpun yang memperhatikan atau melindungi kepentingan korban penyalahgunaan narkotika yang dibebankan kepada korporasi yang telah melakukan tindak pidana narkotika. Korban kejahatan termasuk kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh korporasi sudah barang tentu akan lebih berat sifatnya baik dalam hal kualitas maupun kuantitas dibanding pelaku perorangan, karena secara logika korporasi lebih unggul dalam hal pengorganisasian, jaringan dan

sistem managerial dibanding penjahat perorangan. Oleh sebab itu apabila korporasi berbuat kejahatan maka pada umumnya korbannyapun akan lebih besar dalam jumlah atau dengan kata lain akibat dari penyalahgunaan narkotika oleh korporasi berakibat lebih luas dan lebih fatal di pihak korban.

Keuntungan yang diperoleh sindikat perdagangan narkotika gelap sedemikian besarnya, sehingga mengurangi bahkan dapat menggagalkan keberhasilan penegak hukum atau tercapainya tujuan dari Undang-undang Narkotika. Dengan keuntungan yang luar biasa tersebut, sindikat dapat melanjutkan bahkan meningkatkan kegiatan ilegalnya; bahkan mereka yang sedang ditahan atau yang sedang menjalani pidana dapat menikmati fasilitas-fasilitas uang yang tidak dinikmati pelaku tindak pidana lain.

Untuk melenyapkan keuntungan ilegal tersebut perlu digunakan instrumen hukum yang ampuh, antara lain dengan menyita dan merampas habis

semua keuntungan sindikat gelap itu. 139)

Oleh karena keuntungan yang diperoleh dari perdagangan narkoba yang dilakukan sindikat narkoba (dalam hal ini termasuk korporasi) yang besar bahkan sangat besar sedangkan korban akibat perbuatan mereka juga sangat luas maka alangkah baiknya bahwa uang hasil penyitaan atau perampasan dari tindak pidana ini dapat dialokasikan untuk rehabilitasi korban narkoba dengan dibuat suatu aturan hukum yang mendukung program ini.

f. Rumusan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam UU No. 22 Tahun 1997 Tidak *Applicable*

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana subyek hukum, dalam arti yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dapat melakukan perbuatan pidana hanyalah orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal

139) Andi Hamzah, 1994, *Penyitaan dan Perampasan Harta Hasil Tindak Pidana Narkoba*, BPHN, Jakarta, hal. 108.

59 KUHP yang menganut pandangan bahwa hanya orang atau manusia pribadi yang dapat melakukan perbuatan pidana. Jadi menurut sistem KUHP subyek hukum korporasi belum dikenal, ini berbeda dengan Belanda sebagai tempat asal KUHP disana sejak tahun 1976 sudah mengakui dan memasukkan korporasi sebagai subyek tindak pidana ke dalam buku I KUHP mereka. 140)

Dalam KUHP terdapat tiga pasal yang seolah mengakui korporasi sebagai subyek tindak pidana yaitu :

- Pasal 196 tentang turut serta dalam perkumpulan terlarang.
- Pasal 398 dan Pasal 399 tentang pengurus atau komisaris Perseroan Terbatas, Maskapai Andil Indonesia atau koperasi yang dinyatakan pailit merugikan perseroan.

Baik Pasal 169 maupun Pasal 399 KUHP dalam hal pertanggungjawaban pidana adalah terhadap orangnya dan bukan korporasinya (jadi pertanggungjawaban korporasi juga belum dikenal).

Kalau dicermati ketentuan pemidanaan terhadap korporasi dalam UU No. 22 Tahun 1997 masih banyak

140) Schaffmeister, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hal. 423.

yang menunjuk ke dalam KUHP dengan berdasarkan kepada Pasal 103 KUHP yakni :

Ketentuan umum Buku I KUHP Bab I - VIII
KUHP tentang :

- I. Ruang Berlakunya Ketentuan Pidana
- II. Jenis-jenis Pidana
- III. Pengurangan dan Penambahan Hukuman
- IV. Percobaan
- V. Penyertaan
- VI. Gabungan Tindak Pidana
- VII. Tindak Pidana Aduan
- VIII. Gugurnya Hak Menuntut dan Melaksanakan Hukuman.

Keberanian jaksa untuk menuntut pelaku tindak pidana narkoba korporasi jelas akan sangat diragukan mengingat dasar pijakan/dasar hukum untuk menjerat korporasi tidaklah kuat dan apabila seorang jaksa kalah/gagal dalam penuntutan maka akan mempengaruhi kondite dia. Dari berbagai alasan di atas wajar apabila sampai sekarang belum pernah ada korporasi pelaku tindak pidana narkoba diproses di pengadilan.

Kelemahan yang sangat fatal adalah UU No. 22 Tahun 1997 di dalamnya tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai batas-batas berlakunya aturan pidana bagi korporasi, karena kalau meng-

gunakan Bab I Bk. I KUHP maka ketentuan bab tersebut hanya berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dan bukan badan hukum atau korporasi (Pasal 2, 3, 4, 5, 7 dan 8 KUHP).

Pasal 2 KUHP, ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan perbuatan yang boleh dihukum.

Pasal 3 KUHP, ketentuan pidana dalam perundang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Pasal 4 KUHP, ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang di luar Indonesia melakukan kejahatan....

Pasal 5 KUHP, ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang di luar Indonesia melakukan

Pasal 7 KUHP, ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi Pegawai Negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Bab XXVIII Buku Kedua.

Pasal 8 KUHP, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia bagi Nahkoda dan penum-

pang alat-alat pelayaran Indonesia 141

Dari Pasal 2, 3, 4, 5, 7 dan 8 buku I KUHP tersebut tidak ada satupun ketentuan yang mengatur berlakunya Undang-undang pidana Indonesia bagi korporasi, padahal UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika juga tidak mengatur. Tidak adanya pijakan yuridis mengenai batas berlakunya ketentuan pidana bagi korporasi dalam tindak pidana narkotika mengakibatkan ketentuan tersebut tidak bisa diterapkan dalam praktek.

B. Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Yang Sebaiknya Dirumuskan Dalam UU Narkotika Yang Akan Datang

Dari berbagai kelemahan ketentuan pidana dalam perundang-undangan narkotika sebagaimana diuraikan di atas diharapkan agar undang-undang yang mengatur mengenai narkotika dibenahi demi tercapainya tujuan dikeluarkannya undang-undang tersebut, dalam scope yang lebih luas tercapainya atau terwujudnya kesehatan masyarakat serta kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Pada sub B ini akan dikemukakan berbagai masukan dari hasil penelitian terhadap perundang-undangan pidana di Indonesia dan juga satu Undang-undang Narkotika

141) Moeljatno, Ibid Pasal 2-8.

negara lain dalam hal ini Malaysia yang dikenal keras dalam memberi sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika. Adapun saran atau usul perbaikan terhadap Undang-undang Narkotika yang dikemukakan pada sub B ini hanyalah khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi yang sebaiknya dirumuskan. Jadi bukan perbaikan Undang-Undang Narkotika secara keseluruhan.

Dalam tindak pidana narkotika pelaku korporasi idealnya terdapat tiga pihak yang dapat dipertanggungjawabkan :

1. Pimpinan korporasi
2. Pengurus korporasi
3. Korporasi yang bersangkutan.

1. Pertanggungjawaban Pimpinan Korporasi dalam Tindak Pidana Narkotika

Undang-undang No. 22 Tahun 1997 dalam Pasal 99 mengatur pertanggungjawaban pimpinan korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika.

Rumusan Pasal 99 perlu pembenahan/perbaikan dalam hal :

a. Sanksi Pidana

Bahwa ancaman pimpinan korporasi seharusnya lebih berat dibanding pelaku perorangan dengan mengacu kepada besarnya akibat yang terjadi dari tindak pidana korporasi baik di bidang ekonomi/materi,

di bidang kesehatan atau keselamatan jiwa maupun kerugian di bidang sosial atau moral. 142)

Pertimbangan lain perlunya memperberat sanksi hukum terhadap pimpinan korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika adalah dengan mengacu kepada Pasal 52 KUHP, seorang pegawai yang melanggar kewajiban istimewa dalam jabatannya atau memakai kesempatan, daya upaya, kekuasaan yang diperoleh dari jabatannya, ancaman hukumannya ditambah dengan sepertiga.

Menurut Pasal 349 KUHP jika seorang dukun, tabib atau tukang obat membantu melakukan pengguguran kandungan ancaman hukumannya diperberat dengan ditambah sepertiga 143)

Jadi bagi pimpinan korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika ancaman hukumannya haruslah lebih berat dibanding pelaku/tindak pidana narkotika perorangan/pribadi, misal bisa dengan ditambah sepertiga ancaman hukumannya atau ditambah setengah.

b. Perluasan rumusan Pasal 99

Kalau dicermati Pasal 1 ayat 19 UU No. 22/

142) Is Susanto, 1999, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim ORBA*, Semarang, BP UNDIP, hal. 7.

143) Moeljatno, Ibid.

1997 maka pengertian korporasi adalah sangat luas dan tidak hanya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99. Jadi seharusnya Rumusan Pasal 99 adalah "pimpinan dari korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika" diancam dengan pidana penjara paling lama, dan denda paling banyak rupiah.

- c. Perlunya ketegasan dalam rumusan mengenai pertanggungjawaban pimpinan korporasi bahwa hanya tindak pidana yang secara sengaja (kesengajaan sebagai maksud, sadar kemungkinan maupun kesengajaan kepastian) ataupun secara alpa/karena kealpaan telah diperbuat oleh pimpinan korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan karena orang tidak dapat dipertanggungjawabkan tanpa kesalahan (*afwezigheid van Alle Schuld*) dan *geen Straf zonder Schuld*.

Pasal 99 juga tidak jelas/menimbulkan dualisme pemahaman karena tidak ada kejelasan apakah perbuatan pimpinan korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut sebagai pribadi ataukah sebagai atas nama pimpinan korporasi. Kalau atas nama pimpinan korporasi berarti harus terlebih dahulu ada korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika.

- d. Perlunya pengaturan mengenai percobaan atau per-

mufakatan jahat dari tindak pidana yang diatur oleh Pasal 99, karena kalau mengacu kepada ketentuan Pasal 83, jelas bahwa rumusan tindak pidana percobaan dan pemufakatan jahat Pasal 83 hanya diperuntukkan Pasal 78 - 82. Apabila mengacu kepada Undang-undang payung (KUHP) maka dirasa janggal karena ketentuan Pasal 53 KUHP membedakan dengan ketentuan untuk tindak pidana selesai. Padahal Pasal 83 UU No. 22 Tahun 1997 menentukan bahwa ancaman pidana untuk percobaan dan permufakatan adalah sama dengan tindak pidana yang selesai. Langkah yang paling mudah adalah dengan memperluas rumusan Pasal 83 menjadi "Percobaan dan permufakatan jahat diancam sama dengan tindak pidana selesai".

2. Pertanggungjawaban Pengurus Korporasi

Dari hasil penelitian terhadap ketentuan UU No. 22 Tahun 1997 terlihat bahwa tidak ada satu pasalpun yang mengatur perihal dapat dipertanggungjawabkannya pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana narkoba. Berbeda dengan ketentuan Undang-undang Narkoba sebelumnya yakni UU No. 9 Tahun 1976 Pasal 49 dalam hal dilakukannya tindak pidana narkoba oleh atau atas nama korporasi maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah Korporasi

yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab perbuatan, kedua-duanya.

Ketentuan yang hampir serupa dengan UU No. 9 Tahun 1976 terdapat dalam pasal *Drug Act Malaysia* yang berbunyi :

Where an offence this Act is committed by a company, the chairman and every director and every officer concerned in the management or the company shall be guilty of the like offence, unless he proves to the satisfaction of Court that the act constituting the offence took place without his knowledge or consent.¹⁴⁴⁾

Suatu korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika secara riil adalah perbuatan pengurus korporasi, jadi mestinya pengurus korporasi juga harus dipertanggungjawabkan secara pidana.

3. Pertanggungjawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Pertanggungjawaban terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika sudah dikenal di Indonesia sejak Undang-undang Narkotika 1927 No. 278 jo 536 atau yang lebih dikenal dengan Ordonansi Obat

¹⁴⁴⁾ Dangerous Drug act Malaysia Amandemen tahun 1992, Pasal 35 ayat 1.

Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*). Pertanggungjawaban terhadap suatu badan hukum yang melakukan tindak pidana narkotika menurut Pasal 25 VMO dijatuhkan terhadap pengurus atau komisaris yang tinggal di Indonesia, sedang korporasi itu sendiri tidak dikenai sanksi pidana. 145) Jadi Ordonansi Obat Bius belum mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi.

Undang-undang No. 9 Tahun 1976 sebagai pengganti dari Ordonansi Obat Bius 1927 mulai memperkenalkan dapat dipertanggungjawabkannya korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika melalui rumusan Pasal 49 Undang-undang yang bersangkutan.

Pasal 49 UU No. 9 Tahun 1976 mengatur tentang dijatuhkannya hukuman pidana dan tindakan tata tertib terhadap :

- Perseroan, perserikatan atau yayasan pelaku tindak pidana narkotika;
- Mereka yang memberi perintah;
- Pemimpin atau penanggungjawab perbuatan.

Jika suatu tindakan pidana mengenai narkotika dilakukan oleh atau atas nama badan hukum. 146)

145) *Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Op.Cit., Pasal 25.

146) UU No. 9 Tahun 1976, Op.Cit., Pasal 49.

Nampaknya Undang-undang No. 9 Tahun 1976 sekedar mengenalkan perihal dapat dipertanggungjawabkannya korporasi karena ketentuan Pasal 49 dalam praktek tidak dapat dioperasionalisasikan berkaitan dengan tidak adanya penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan badan hukum dan tidak adanya sanksi apa yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi/badan hukum tersebut.

UU No. 22 Tahun 1997 sebagai pengganti dari UU No. 9 Tahun 1976 di dalamnya diatur pertanggungjawaban korporasi akan tetapi ketentuan pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 secara realita sampai sekarang belum pernah digunakan dalam praktek, hal ini dimungkinkan karena mengandung banyak kelemahan sebagaimana diuraikan dalam sub A di atas.

Dalam rangka tercapainya tujuan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1997 maka sudah saatnya kelemahan pengaturan pertanggungjawaban korporasi harus dibenahi sehingga dapat efektif dan *applicable*.

Hal-hal yang harus diperhatikan dan dibenahi dalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-undang narkotika adalah sebagai berikut :

a. Penerapan model *Double track system* dalam pemidanaan korporasi

Ancaman pidana denda sebagai satu-satunya jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika mengandung kelemahan dari segi tujuan pemidanaan maupun dari segi pelaksanaan eksekusi yang relatif sulit serta adanya kemungkinan tidak bisa diterapkan dalam hal korporasi itu benar-benar tidak mampu membayar padahal alternatifnya adalah kurungan pengganti denda yang tidak mungkin diterapkan terhadap korporasi.

Double track system mengajarkan tentang penggunaan sanksi ganda terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika. Sistem ganda mengajarkan bahwa di samping pidana denda dan pidana tambahan kepada korporasi dikenakan pula tindakan sebagai upaya untuk mengurangi kelemahan-kelemahan yang diakibatkan keterbatasan efek dari penerapan pidana pokok dan tambahan. 147)

Pidana pokok terhadap korporasi dapat berupa pidana denda sedang pidana tambahan dapat berupa :

- Pencabutan hak-hak yang diperoleh korporasi

147) Hamzah Hatrik, Op.Cit., hal. 107.

- Perampasan barang-barang tertentu
- Pengumuman keputusan hakim
- Pembayaran ganti rugi

Selain pidana pokok dan tambahan tersebut dapat pula dijatuhkan tindakan berupa :

- Pencabutan keuntungan yang diperoleh korporasi dari tidak pidana yang dilakukan
- Penutupan perusahaan untuk jangka waktu tertentu/seterusnya
- Penempatan perusahaan dalam pengawasan. 148)

Model *double track system* dalam pemidanaan korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Drt. 1955 dapat diikuti/dijadikan acuan juga.

Pidana pokok bagi korporasi yang melakukan tindak pidana ekonomi adalah pidana denda sedang pidana tambahan :

- Pencabutan hak
- Perampasan barang baik barang tetap maupun tidak tetap baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud
- Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah/akan diperoleh

148) Ibid, hal. 108.

dari pemerintah

- Pengumuman keputusan hakim
- Perampasan barang.

Menurut sistem UU No. 7 Drt. 1955 selain pidana pokok dan tambahan di atas dapat juga dijatuhkan tindakan tata tertib dan tindakan tata tertib sementara kepada korporasi yang masih dalam proses pemeriksaan.

Tindakan tata tertib bagi korporasi pelaku tindak pidana :

- Penempatan perusahaan si terhukum di bawah pengampunan untuk waktu tertentu
- Pembayaran uang jaminan
- Pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan
- Perbaikan akibat tindak pidana

Tindakan tata tertib sementara kepada korporasi yang masih dalam proses pemeriksaan dapat berupa :

- Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan tersangka untuk waktu tertentu
- Penempatan tersangka di bawah pengampunan untuk waktu tertentu
- Pencabutan seluruh/sebagian hak atau keuntungan yang telah atau akan diberikan oleh pemerintah

- Supaya tersangka tidak melakukan perbuatan tertentu
- Supaya pengumpulan barang yang akan disita di tempat tertentu. 149)

Model *double track system* juga dipakai oleh tim perumus KUHP 1999/2000. Adapun jenis hukuman/pidana yang cocok untuk korporasi dengan mengacu kepada jenis-jenis pidana konsep KUHP adalah : pidana pokok pidana denda sedangkan pidana tambahannya adalah :

- Pencabutan hak yang diperoleh korporasi
- Perampasan barang
- Pengumuman keputusan hakim
- Pembayaran ganti rugi
- Pemenuhan kewajiban adat

Tindakan yang cocok diterapkan kepada korporasi adalah :

- Perampasan keuntungan yang diperoleh tindak pidana
- Perbaikan akibat tindak pidana. 150)

Kalau kita sepakat bahwa tindak pidana korporasi menimbulkan akibat yang sangat besar dan

149) Undang-undang No. 7 Drt. 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan, Tindak Pidana Ekonomi.

150) Konsep KUHP 1999/2000.

ingin diberantas maka menurut hemat penulis model *double track system* dari UU No. 7 Drt 1955 salah satu alternatif yang tepat untuk dipakai. Ibarat jaring lebih rapat lebih kuat.

Dengan mengacu sistem pemidanaan *double track* dari UU No. 7 Drt 1955 maka kelemahan sistem pemidanaan korporasi Undang-undang Narkotika No. 22 Tahun 1997 khususnya mengenai :

- Sanksi pidana denda sebagai sanksi tunggal yang tidak memberi pilihan
- Sanksi pidana denda yang mengandung banyak keterbatasan akan dapat dieliminir dengan jenis sanksi yang lain.

Double track system dalam pemidanaan korporasi dengan model yang serupa dengan Undang-undang No. 7 Drt 1955 terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Pasal 47 Undang-undang Lingkungan Hidup mengatur tentang pidana dan tindakan yang bisa dijatuhkan adalah :

- Pidana pokok pidana denda ditambah sepertiga (ancamannya)
- Pidana tambahan = - perampasan barang
 - pengumuman keputusan hakim
- Tindakan = - perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak

pidana

- penutupan seluruh atau sebagian perusahaan
- perbaikan akibat tindak pidana.
- mewajibkan apa yang dilaikan tanpa hak dan atau
- meniadakan apa yang dilaikan tanpa hak
- penempatan perusahaan di bawah pengampuan. 151)

b. Perumusan tentang dapat dipidananya korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika hendaknya dilakukan dalam pasal tersendiri secara jelas dan tuntas, tidak digabung dengan pasal yang mengatur untuk pertanggungjawaban orang pribadi, seperti rumusan Pasal 78 - 82 ayat 4 UU No. 22 tahun 1997. Adapun cara merumuskan dapat dilakukan dalam pasal yang terpisah dan dalam sub bab terpisah misalnya dalam sub bab berjudul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Atau dengan meniru model *Drug Act Malaysia* yang mengatur tersendiri pertanggungjawaban Perusahaan beserta pimpinan

151) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 47.

perusahaan dan karyawannya bahkan sampai tingkat agen jika dilakukan tindak pidana narkotika/psikotropika (di Malaysia Undang-undang yang mengatur narkotika dan psikotropika dijadikan satu).

Menurut Pasal 35 Bagian VI dari *Drug Act Malaysia* dalam hal terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh sebuah perusahaan maka pertanggungjawaban dibebankan kepada :

- pimpinan dan semua direktur dan setiap pejabat yang terkait dalam manajemen perusahaan
- orang yang mendapat ijin usaha terhadap kelalaian agen atau pelayan
- agen atau pelayan

(Any person licensed or authorized under any regulation made there under this Act who would be able under this Act or under any regulation made there under to any punishment, penalty or forfeiture for any act, omission, neglect or default shall be liable to this same punishment, penalty or forfeiture for every such act, omission, neglect or default of any agent or servant employed by him in the course of his business as such licensed or authorized person, if such act, omission, neglect or default is committed by such agent or servant in the course of his employment by such licensed or authorized person.

Every such agent or servant shall also be liable to every punishment, penalty or forfeiture prescribed by this Act or under any regulation made thereunder for such acts, omissions, neglect or defaults done or omitted to be done by him as fully and effectually as if had been the person licensed or authorized. 152)

*Dibeli
perman
tan di
lu.*

152) Dangerous Drugs Act (Malaysia), Op.Cit., Pasal

?

Model pertanggungjawaban korporasi dari undang-undang tindak pidana ekonomi juga dapat ditiru :

- (1) Jika suatu tindakan pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum suatu perseroan, suatu perserikatan yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.
- (2) Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak itu dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak

pidana tersebut.

- (3) Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan, badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang, oleh salah seorang dari mereka. Wakil dapat diwakili orang lain. Hakim dapat memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri di pengadilan, dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu dibawa ke muka hakim.

- (4) Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap perseroan atau suatu yayasan, maka segala panggilan untuk menghadap dan segala penyerahan surat-surat panggilan itu akan dilakukan kepada kepala pengurus atau di tempat tinggal kepala pengurus atau di tempat pengurus bersidang atau berkantor. 153)

Pertanggungjawaban pidana korporasi yang jelas dan tuntas juga terdapat dalam Pasal 45,

153) A. Hamzah, 1983, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, hal. 127-128.

dan 46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 45

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 46

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun

berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang menerima perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

(3) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan tetap.

(4) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri ke pengadilan. 154)

Dari ketiga model perumusan pertanggungja-

154) Koesnadi Hardjasoemantri, Op.Cit., hal. 572.

waban korporasi di atas jelas dan tuntas tentang:

- Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan
- Siapa yang mewakili
- Sanksi hukumnya apa saja dan
- Tindak pidana apa yang dilarang

c. Perlunya pasal yang menegaskan bahwa ketentuan Undang-undang Narkotika didahulukan sebagai pengecualian terhadap Undang-undang Umum (KUHP) maupun UU terkait

Ketentuan ini adalah penting mengingat apabila terjadi benturan seperti benturan dengan KUHP, bahwa KUHP sampai sekarang belum mengatur pertanggungjawaban korporasi tetapi hanya mengakui pertanggungjawaban perorangan/pribadi.

Contoh lain tentang pentingnya ketegasan bahwa Undang-undang mana yang harus dilakukan adalah ketentuan Pasal 99 Undang-undang Narkotika. Apabila terjadi penyalahgunaan narkotika di suatu laboratorium sebuah fakultas siapakah yang harus dipertanggungjawabkan. Menurut Undang-undang Narkotika (Pasal 99) maka yang bertanggungjawab adalah sampai dengan Rektor/Direktur tetapi menurut Undang-undang Pendidikan penanggungjawabnya adalah pimpinan laboratorium.

Dari gambaran di atas jelas bahwa perlu ada pasal tersendiri yang mengatur apabila terjadi

benturan dengan perundang-undangan pidana yang lain maka ketentuan undang-undang narkotikalah yang didahulukan.

- d. Perlunya pasal yang mengatur jangka waktu pembayaran denda dan memberi wewenang kepada jaksa untuk menjual aset korporasi sebagai pembayaran denda yang tidak terbayar. Dengan sistem ini akan lebih cepat dan hemat biaya karena kalau ditempuh jalan perdata terhadap denda yang tidak terbayar misalnya dengan menggugat secara perdata agar dilakukan "*conserve-toir beslag*" terhadap barang-barang milik tergugat yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana 155) memerlukan waktu yang lama dan biaya besar.
- e. Perlunya kategorisasi pidana denda dalam tindak pidana narkotika

Agar kesenjangan putusan hakim tidak terlalu tajam khususnya dalam hal pidana denda maka salah satu langkah yang perlu ditempuh adalah dengan sistem kategorisasi pidana denda. Keuntungan lain dari sistem kategori adalah memudahkan menyesuaikan dengan fluktuasi nilai tukar uang yang cepat berubah seperti rupiah, karena cukup perubahan aturan kategorinya tanpa harus

155) Niniek Suparni, Op.Cit., hal. 62.

merubah keseluruhan pasal.

Model kategori pidana denda dapat meniru Konsep KUHP 1999/2000 yang mengelompokkan pidana denda menjadi 6 kategori dan dalam tiap pasal yang di dalamnya ada pidana denda cukup dicantumkan pidana denda kategori yang diinginkan/yang sesuai.

- f. Perlunya pengaturan bagi tindak pidana narkotika pelaku korporasi yang belum selesai

Pasal 83 UU No. 22 Tahun 1997 sudah jelas mengatur bahwa percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 - 82 diancam dengan pidana yang sama sesuai yang diatur dalam pasal-pasal tersebut.

Perlu diingat bahwa kualifikasi percobaan (Pasal 53 KUHP) adalah perbuatan yang niat itu telah nampak dari permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan adalah bukan karena kehendak sendiri.

Pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP adalah dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan. Baik Pasal 53 maupun Pasal 88 adalah dimaksud untuk perbuatan orang pribadi bukan perbuatan badan hukum.

Dari uraian di atas jelas bahwa tindak

pidana korporasi yang belum selesai, tidak diatur oleh UU No. 22 Tahun 1997 sedang kalau ingin merujuk kepada ketentuan Pasal 103 KUHP dengan memakai ketentuan Pasal 53 dan 88 maka hal itu tidak dapat dilakukan, sehingga perlunya pengaturan perihal tindak pidana korporasi yang belum selesai dengan menganalogikan dengan tindak pidana yang pelakunya orang pribadi yang belum selesai dilakukan.

g. Perlunya ketentuan ruang berlakunya UU Narkotika bagi korporasi karena apabila mendasarkan kepada bab I KUHP hanya berlaku bagi orang/pribadi

Kalau disimak ketentuan Bab I KUHP Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP semuanya menunjukkan bahwa ruang berlakunya perundang-undangan pidana hanya untuk pelaku orang pribadi dan tidak ada satu pasalpun yang berlaku bagi badan hukum. Jadi seandainya mendasarkan Pasal 103 KUHP untuk menjadikan ketentuan Bab I - VIII KUHP sebagai sandaran maka hal itu bagi korporasi tidak bisa. Oleh karenanya perlu pasal/bab tersendiri tentang ruang berlakunya Undang-undang Narkotika bagi korporasi mana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, apakah yang ada di wilayah teritorial Indonesia ataupun juga terhadap semua

korporasi (asas universal) ataupun hanya yang merugikan/membahayakan kepentingan Indonesia.

Demikian beberapa hal yang bisa dikemukakan dari hasil penelitian terhadap berbagai perundang-undangan pidana Indonesia dan *Drug Act Malaysia*.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat ditarik dua kesimpulan pokok yakni :

1. Kebijakan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana narkoba di Indonesia

Pertanggungjawaban korporasi pelaku tindak pidana narkoba sudah mulai dikenal sejak dikeluarkannya V.M.O. (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*) pada masa penjajahan Belanda, tahun 1927, dengan beberapa penyesuaian tetap diberlakukan setelah Indonesia merdeka hingga tahun 1976. Pada tahun 1976 dikeluarkanlah UU No. 9 tahun 1976 tentang Undang-undang Narkotika sebagai Undang-undang Narkotika Nasional. Setelah berlaku 21 tahun, pada tahun 1997 undang-undang No. 9 Tahun 1976 diganti dengan Undang-undang Narkotika yang baru yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1997.

V.M.O. Stb. 1927 No. 278 jo 536 sudah mulai mengenal korporasi sebagai pelaku tindak pidana tetapi dalam hal pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus.

Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika sudah memperkenalkan pertanggungjawaban kor-

porasi pelaku tindak pidana.

Menurut UU No. 9 Tahun 1976 Pasal 49 dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan korporasi maka terdapat dua kelompok yang bisa dipertanggungjawabkan :

- pengurus dan pimpinan korporasi,
- korporasi yang bersangkutan.

Selain itu ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU No. 9 Tahun 1976 tidak operasional karena tidak ada ruang berlakunya Undang-undang No. 9 Tahun 1976 bagi badan hukum. Juga tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan badan hukum oleh UU tersebut.

Undang-undang No. 22 Tahun 1997 sebagai pengganti dari UU No. 9 Tahun 1976 sudah memperkenalkan pula tentang dapat dipertanggungjawabkannya korporasi/badan hukum yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 9 Tahun 1976, ketentuan pertanggungjawaban korporasi dalam UU No. 22 Tahun 1997 menimbulkan permasalahan karena :

- tidak ada pengaturan mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hal korporasi melakukan tindak pidana narkoba.
- tidak ada ruang berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1997 bagi korporasi.
- sanksi tunggal (denda) yang kemungkinan tidak

akan efektif karena mengandung kelemahan-kelemahan.

2. Kebijakan pertanggungjawaban korporasi yang sebaiknya dirumuskan dalam UU Narkotika yang akan datang

Setelah dilakukan penelitian terhadap berbagai perundang-undangan pidana Indonesia yang didalamnya mengatur pertanggungjawaban korporasi serta *Drugs Act Malaysia* sebagai pembanding untuk memberikan alternatif atau masukan guna pembenahan ketentuan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana narkotika di masa yang akan datang.

Adapun masukan yang diajukan adalah :

- a. Mengenai pertanggungjawaban pimpinan korporasi
 - Pertanggungjawaban pimpinan korporasi seyogyanya adalah lebih berat dari pertanggungjawaban pengurus dengan mengacu kepada pasal 52 dan 349 KUHP.
- b. Perlunya pengaturan mengenai pertanggungjawaban pengurus korporasi (apakah sama dengan pelaku biasa ataupun lebih berat)
- c. Pertanggungjawaban korporasi, hal-hal yang perlu pembenahan / pengaturan adalah :
 - Penerapan *double track system* (memadukan antar pidana dan tindakan) agar efektif

- Perumusan dalam pasal tersendiri/sub bab tersendiri "tidak dicantolkan" ke dalam pasal yang mengatur pertanggungjawaban orang pribadi)
- Perlunya pasal yang mengatur tentang UU Narkotika didahulukan sebagai pengecualian terhadap UU yang lain sehingga apabila terjadi benturan Undang-undang narkotika yang dipakai.
- Pembatasan jangka waktu pembayaran denda.
- Kategorisasi pidana denda
- Percobaan tindak pidana
- Ruang berlakunya UU Narkotika bagi Korporasi

B. Saran-saran

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Ketentuan Undang-undang Narkotika merupakan ujung tombak untuk menanggulangi tindak pidana narkotika karena merupakan landasan berpijak aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan. Oleh karena itu pembenahan aturan hukum di bidang narkotika mutlak tidak dapat ditawar-tawar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdurrachman, A, 1963, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Abidin, Andi, Zaenal, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- _____, 1987, *Azas-azas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung : Alumni.
- Adji, Oemar Seno, 1984, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Jakarta : Erlangga.
- Ali, Chidir, 1987, *Badan Hukum*, Bandung : Alumni.
- Andreau, Fockema, 1983, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta : Bina Cipta.
- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 1995, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 2000, *Penegakan dan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Pada Pendidikan dan pelatihan Aparatur Penegak Hukum di Pusdiklat Dep. Kumdang, Cinere, Jakarta.
- _____, _____, *Kebijakan Penanggulangan Narkoba Dengan Hukum Pidana*, Makalah, _____
- Atmasasmita, Romli, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum, Nasional*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 1992, *Masalah-masalah Yang Berkaitan Dengan Penerapan dan Pelaksanaan Konvensi Internasional Tentang Lalu Lintas Perdagangan Gelap Obat Narkotika dan Psikotropika*, Makalah pada Pertemuan Ilmiah Penyitaan Hak Milik Pelaku Tindak Pidana Narkotika tgl. 8-10 Desember 1992, Jakarta, BPHN.
- Blecker, Annie, 1999, *Pendidikan dan Konseling Penyalahgunaan Narkoba*, Sydney : Database Kliknarkoba com.

- Box, Steven, 1985, *Power, Crime and Mystification*, London: Tavistock.
- Budiarti, 1994, *Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, Makalah pada Pertemuan Ilmiah tentang Penyitaan Hak Milik Pelaku Tindak Pidana Narkotika tgl. 8-10 Desember 1992, Jakarta : Depkeh.
- Clinard, Marshall, B. and, Yeager, Peter, 1980, *Corporate Crime*, London : Collar Macmillan Publ.
- Departemen P dan K, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Depkeh, 1994, *Pertemuan Ilmiah tentang Penyitaan Hak Milik Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : BPHN.
- Direktorat Reserse Pidana Narkoba, 2002, *Pedoman untuk Orang Tua Dan Tokoh Masyarakat tentang Bahaya Narkoba*, Jakarta : Data Base kliknarkoba Com.
- Direktorat Perundang-undangan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1999/2000, *Rancangan Undang-undang Republik Indonesia, Nomor:, Tahun tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.
- Dirdjosisworo, Sudjono, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 1976, *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*, Bandung: Tribisana Karya.
- _____, 1976, *Kriminalistik*, Bandung : Rosda Karya.
- DPW Wanita Katolik, 2001, *Petunjuk Praktis Bagi Keluarga untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Yogyakarta : Media Presindo.
- Hamzah, Andi, 1987, *KUHP Malaysia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____, 1994, *Penyitaan dan Perampasan Harta Hasil Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : BPHN.
- Hardjasoemantri, Kusnadi, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta : Gajahmada University Press.
- Hatrik, Hamzah, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Hawari, Dadang, 2001, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*, Jakarta : BP FKUI.
- J. Moleong, Lexy, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda Karya.
- Kansil, CST, 1986, *Kitab Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta : Bina Aksara.
- Kartanegara, Satochid, ———, *Hukum Pidana*, ———, Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, 1982, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru.
- Lewuk, Dominichus, 2001, *Narkoba*, Yogyakarta : Media Pressindo.
- Moeljatno, 1980, *Azas-azas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty.
- , 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- , 1994, *KUHP*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- Muladi dan Priyatno, Dwidja, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : STH.
- Prasetyo, Rudi, 1989, *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangan*, Makalah Pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi Tgl. 23-24 Nopember 1989, Semarang : FH UNDIP.
- Puspa, Yan Pramadya, 1997, *Kamus Hukum*, Semarang : CV. Aneka.
- P₃B, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Dep. P & K.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung : Alumni.
- , 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sahetapy, J.E., 1989, *Kejahatan Korporasi Ditinjau Dari Sudut Kriminologi*, Makalah Pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi 23-24 Nopember 1989, Semarang: FH UNDIP.

- _____, 1994, *Kejahatan Korporasi*, Bandung : _____.
- Said, Natsir, M., 1997, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru.
- _____, 1984, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : BPHN.
- _____, 1983, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru.
- Schaffmeister, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty.
- Simorangkir, J.C.I., 1983, *Kamus Hukum*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Soemitro, 1991, *Hukum Pidana I*, Surakarta : UNS Press.
- Soemitro, Ronny, Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R., 1983, *KUHP dan Penjelasannya*, Bogor : Politeia.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.
- _____, 1997, *Hukum Pidana I*, Semarang : FH UNDIP.
- Sudarto dan Wonosutanto, 1987, *Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, Surakarta : FH UMS.
- Sumardjono, Maria, SW., 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta : Gramedia.
- Supardi, Niniek, 1993, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Susanto, Is, 1995, *Kejahatan Korporasi*, Semarang : BP UNDIP.
- _____, 1999, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim ORBA*, Semarang : BP UNDIP.

Team Penatar P4, 1994, UUD 1945, Surakarta : UNS Press.

Thaib, Dahlan, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Tjitro Sudibio, R., Subekti, 1979, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradaya Paramita.

_____, 1999, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradaya Paramita.

_____, 2000, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, Jakarta, Pradaya Paramita.

United Nations, Report, 1991, *Eight United Nations Congress on The Preventions of Crime and The Treatment of Offender*, 1990, New York : UN.

Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas.

Warasih, Esmi, 1999, *Metodologi Penelitian Humaniora*, Semarang : FH UNDIP.

Wignyosoebroto, Soetandyo, 1994, *Masalah Metodologi Dalam Penelitian Hukum*, Semarang : FH UNDIP.

Undang-undang :

- *Dangerous Drugs Act Malaysia 1952 Amended by Act 1992.*
- UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-undang No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika.
- Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.
- Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP.
- Undang-undang No. 7 Drt. 1955 tentang penyusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
- UU No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan - Jumlah Hukuman Denda.

- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- *Verdoovende Middelen Ordonnantie* Stb. 1927 No. 278 Jo 536 (Ordonansi Obat Bius).